



PEDOMAN PELAKSANAAN

SISTEM PENGELOLAAN INFORMASI



**PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(PNPM) MANDIRI**



Perkembangan *Information and Communication Technology* (ICT) saat ini sudah demikian pesat termasuk pemanfaatannya di dalam berbagai bidang. Seiring dengan itu, PNPM Mandiri yang mencakup beberapa program sektor dengan cakupan wilayah yang luas turut pula memanfaatkan teknologi tersebut.

Pengelolaan Sistem Informasi atau *Management Information System* (MIS) PNPM Mandiri yang dikembangkan dengan berbasis ICT mengacu kepada MIS yang telah dikembangkan oleh masing-masing pengelola program sektor. Penyesuaian dan penyempurnaan MIS untuk PNPM Mandiri dimungkinkan demi terwujudnya sistem informasi pengelolaan program-program yang lebih terpadu, mudah dalam pengoperasiannya, serta menjangkau data dan informasi sampai ke tingkat terendah dari penerima manfaat.

Pedoman MIS PNPM Mandiri ini selanjutnya menjadi pedoman bagi pengembangan MIS dari masing-masing pengelola program sektor. Tidak menutup kemungkinan bagi setiap pengelola program sektor untuk menyesuaikan MIS yang telah berjalan selama ini, agar data dan informasi yang disajikan kepada publik maupun kepada para pengambil kebijakan menjadi lebih terintegrasi, aktual, dan detail.

Pengelola PNPM Mandiri menyadari dengan semakin kompleksnya program, luasnya jangkauan wilayah program, serta teknologi yang dipergunakan sangat memungkinkan munculnya berbagai permasalahan dalam pengembangan dan pengaplikasiannya. Namun demikian untuk mewujudkan suatu sajian informasi PNPM Mandiri yang lebih komprehensif, akurat, dan terkini harus dimulai saat ini.

Penyempurnaan sistem akan terus dilakukan untuk mengembangkan suatu sistem informasi yang terpercaya dan memungkinkan untuk dijadikan contoh bagi program-program penanggulangan kemiskinan lainnya dan bahkan program-program pemerintahan secara luas.



Ucapan terima kasih disampaikan kepada tim penyusun yang dikoordinasikan oleh Bappenas atas waktu dan curahan pikiran demi terwujudnya pedoman dan sistem ini.

Kritik dan masukan selalu diharapkan demi penyempurnaannya.

Jakarta, April 2008

Deputi Menko Kesra
Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
selaku Ketua Pelaksana Tim Pengendali PNPM Mandiri

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sujana Royat'.

Sujana Royat



Kemiskinan masih merupakan permasalahan utama pembangunan hingga saat ini. Untuk mengefektifkan upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai pihak, sasaran pada kelompok masyarakat miskin dan wilayah tertinggal perlu dilakukan dengan lebih terarah. Namun, minimnya data kemiskinan selama ini sering menjadikan target berbagai program penanggulangan kemiskinan tidak tepat sasaran sehingga jumlah penduduk miskin sulit dikurangi. Kurangnya informasi mengenai berbagai dimensi kemiskinan lainnya juga menjadi kendala bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang membutuhkan intervensi kebijakan yang multidimensi.

PNPM Mandiri yang mencakup berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh banyak kementerian/lembaga untuk itu, perlu dilengkapi oleh sistem informasi yang terintegrasi, terbuka, dan mudah diakses. Untuk mengembangkan sistem data dan informasi PNPM Mandiri tersebut, disusun Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Informasi (SPI) atau Management Information System (MIS) PNPM Mandiri ini. Pedoman ini melengkapi Pedoman Umum PNPM Mandiri dan merupakan salah satu pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri yang disusun dalam buku terpisah.

Pedoman Sistem Pengelolaan Informasi PNPM Mandiri ditujukan bagi pelaksana masing-masing program PNPM Mandiri baik di pusat maupun daerah untuk melakukan penyesuaian di masing-masing program dan mengembangkannya dalam kesatuan sistem informasi PNPM Mandiri. Dengan sistem informasi yang terintegrasi dan terbuka, berbagai pihak terkait dapat dengan mudah memanfaatkan data dan informasi untuk ikut mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan di negeri ini. Berbagai saran dan kritik bagi perbaikan pedoman ini sangat diharapkan.

Jakarta, April 2008

Tim Penyusun



- Sambutan** 2
- Prakata** 4
- Daftar Isi** 5
- Daftar Istilah dan Singkatan** 6
- Daftar Gambar** 7
- Daftar Lampiran** 7
- BAB I Pendahuluan** 8
 - 1.1. Latar Belakang 8
 - 1.2. Tujuan 9
- BAB II Tahapan Sistem Pengelolaan Informasi PNPM Mandiri** 10
 - 2.1. Sistem Pengelolaan Informasi PNPM Mandiri 10
 - 2.2. Kerangka Perencanaan Kegiatan Pembangunan SPI PNPM Mandiri 13
 - 2.3. Tahap Pengembangan Sistem Pengelolaan Informasi PNPM Mandiri 13
 - 2.3.1. Tahap Konsolidasi 13
 - 2.3.2. Tahap Pengintegrasian Pendataan 15
- BAB III Ketentuan Umum Pengelolaan SPI PNPM Mandiri** 16
 - 3.1. Ketentuan Umum 16
 - 3.2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PNPM Mandiri 17
 - 3.3. Materi Pemantauan dan Evaluasi Melalui SPI 18
 - 3.4. Metode Pemantauan dan Evaluasi Melalui SPI 18
 - 3.5. Pelaporan Dari Hasil Pemantauan dan Evaluasi Melalui SPI 19
- BAB IV Penutup** 22



DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Executive Information System (EIS)	: Sistem Informasi untuk pengambilan keputusan
<i>Geographical Information System (GIS)</i>	: Sistem Informasi Geografi
<i>Log Book</i>	: Daftar Isian MIS
PISEW	: Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
P2DTK	: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus
P2KP	: Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PPK	: Program Pengembangan Kecamatan
PPIP	: Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan
SPI (MIS)	: Sistem Pengelolaan Informasi (Management Information System)
<i>Standart Operation Procedures (SOP)</i> Pendataan	: Pedoman Pelaksanaan Pendataan



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Umum Sistem Pengelolaan Informasi PNPM Mandiri.

Gambar 2 : Kerangka Rencana Pembangunan SPI PNPM Mandiri 2008 dan 2009

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Struktur Pengelolaan Data SPI PNPM Mandiri

Lampiran 2 : Tata Cara Pelaksanaan Operasional SPI PNPM Mandiri

Lampiran 3 : Standar Kode Lokasi dan Kegiatan

Lampiran 4 : Prosedur Operasional Standar Mekanisme Verifikasi SPI PNPM Mandiri

Lampiran 5 : Kerangka Logis PNPM Mandiri

Lampiran 6 : Daftar Istilah Data



1.1. LATAR BELAKANG

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Untuk mengefektifkan upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai pihak, penetapan sasaran kelompok masyarakat miskin dan wilayah tertinggal serta pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan dengan lebih terarah. Namun, minimnya data dan informasi kemiskinan selama ini menjadi kendala bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang membutuhkan intervensi kebijakan secara multidimensi dan bersinergi.

Pelaksanaan PNPM Mandiri dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008 dan ke depan PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan (PIIP), Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dan program-program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh berbagai sektor lainnya. Pada tahun 2009 PNPM Mandiri akan mencakup seluruh kecamatan di Indonesia.

Mengingat cakupan kecamatan dan banyaknya program pemberdayaan masyarakat dalam PNPM Mandiri, diperlukan konsolidasi sistem informasi yang terintegrasi agar pelaksanaan dan kinerja keberhasilan PNPM Mandiri dapat dengan mudah dipantau dan dievaluasi. Konsolidasi sistem informasi berbagai program pemberdayaan masyarakat tersebut untuk selanjutnya perlu dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem serta mekanisme dan prosedur data dan informasi. Sistem pengelolaan informasi pada program-program sektor, juga menjadi bagian yang tidak



terpisahkan dari mekanisme pemantauan dan evaluasi PNPM Mandiri.¹ Keberadaan Sistem Pengelolaan Informasi (SPI) atau Management Information System (MIS) PNPM Mandiri, berfungsi sebagai katalisator dalam mengintegrasikan proses pengelolaan data dan informasi antar program sektor yang terpadu.

1.2. TUJUAN

Dokumen ini ditujukan sebagai Pedoman Pelaksanaan (*Standard Operation Procedures*) Sistem Pengelolaan Informasi (SPI) PNPM Mandiri bagi para pelaksana program dan kementerian/lembaga baik di pusat maupun daerah yang tercakup dalam PNPM Mandiri untuk melakukan penyesuaian di masing-masing program dan mengembangkannya dalam kesatuan sistem informasi PNPM Mandiri. Pengembangan sistem pengelolaan informasi yang terintegrasi dan terbuka akan memudahkan berbagai pihak memanfaatkan data dan informasi untuk mempercepat upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.

Dokumen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai pedoman PNPM Mandiri dan berfungsi sebagai panduan pengelolaan data dan informasi untuk mendukung kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan PNPM Mandiri.

¹ Untuk memudahkan pemahaman dalam membedakan antara PNPM Mandiri dengan program-program pemberdayaan masyarakat di dalam lingkup koordinasinya, selanjutnya program-program tersebut diistilahkan dengan program-program sektor.



2.1. SISTEM PENGELOLAAN INFORMASI PNPM MANDIRI

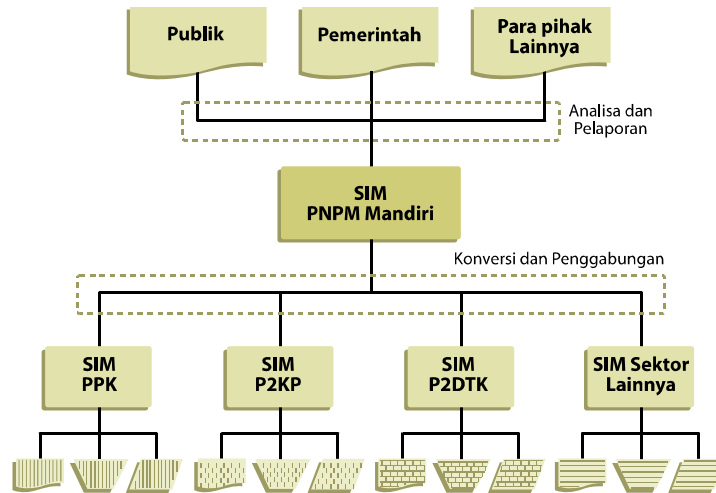
Sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang mempunyai keterkaitan antar satu dan lainnya yang bertujuan menghasilkan keluaran informasi terkait suatu bidang tertentu. Sistem Pengelolaan Informasi (SPI) atau *Management Information Sistem* (MIS) adalah sebuah sistem yang mampu menghasilkan keluaran informasi dengan menggunakan masukan data tertentu, yang disertai oleh berbagai proses terkait untuk memenuhi tujuan dalam suatu kegiatan pengelolaan. Dalam sebuah sistem informasi, diperlukan adanya klasifikasi alur informasi untuk memperjelas keanekaragaman kebutuhan informasi oleh penggunanya. Sebuah sistem pengelolaan informasi yang baik, harus memenuhi syarat fleksibilitas, efektif dan efisien.

SPI PNPM Mandiri adalah sebuah sistem yang direncanakan untuk memantau dan mengevaluasi capaian pelaksanaan program-program PNPM Mandiri di lapangan melalui mekanisme pengelolaan data dan informasi yang terpadu dan terbuka. Keluaran data dan informasi yang dihasilkan akan dimanfaatkan dalam kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan program sektor dalam kerangka pengelolaan PNPM Mandiri.

Komponen penyusun SPI PNPM Mandiri adalah sistem informasi di masing-masing program sektor yang dipadukan dalam satu payung mekanisme pengelolaan yang terintegrasi dan bersinergi untuk menjembatani kegiatan pemantauan dan evaluasi PNPM Mandiri secara keseluruhan (lihat Gambar 1). Program-program tersebut termasuk di dalamnya adalah program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga sektoral.



Gambar 1.
Kerangka Umum Sistem Informasi Manajemen PNPM Mandiri



Pengembangan SPI PNPM Mandiri memiliki masalah mendasar yang juga dialami dalam pelaksanaan program-program pembangunan selama ini. Cakupan lokasi yang luas dan tersebar di berbagai pelosok serta beragamnya pendekatan dan model pengelolaan di lapangan merupakan hal mutlak yang perlu dikoordinasikan. Koordinasi aspek lokasi dan pengelolaan tersebut diperlukan pada setiap jenjang pelaksanaan. Hal ini akan dikembangkan lebih lanjut dalam pengembangan SPI PNPM Mandiri.

Tahap pembangunan SPI PNPM Mandiri terdiri atas:

a. Tahap Konsolidasi

Tahap pertama pengembangan SPI PNPM Mandiri adalah konsolidasi data antar sistem informasi di masing-masing program, dengan menggunakan mekanisme konsolidasi dan standar data penggabungan yang telah disepakati dan menjadi acuan dalam pedoman ini. Tidak ada perubahan mekanisme operasional di tingkat program. Pada tahap ini juga dilakukan penilaian kebutuhan awal yang akan digunakan dalam pembangunan SPI PNPM Mandiri secara terintegrasi pada tahap berikutnya.

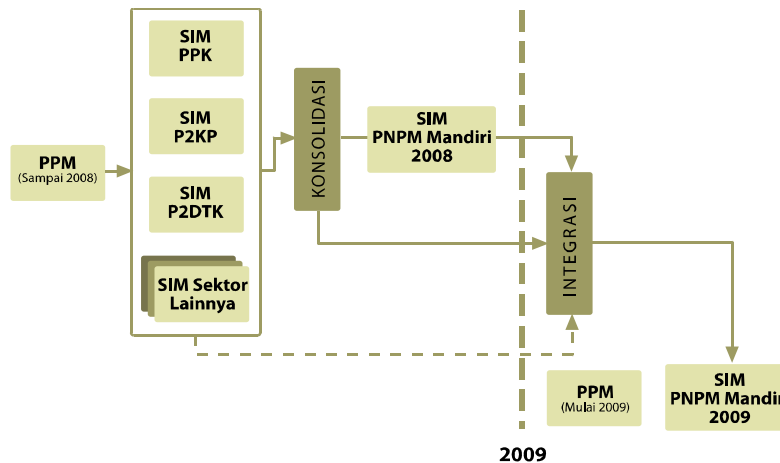
b. Tahap Integrasi

Setelah kegiatan konsolidasi selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan mekanisme dan proses pendataan kegiatan PNPM Mandiri. Pada tahap ini juga dilakukan peningkatan kualitas pengelolaan data dan informasi program dalam satu kerangka SPI PNPM Mandiri melalui kegiatan sebagai berikut:

- Menyediakan informasi yang diperlukan dalam penilaian keseluruhan kegiatan dan pencapaian tujuan PNPM Mandiri, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- Menyediakan informasi yang diperlukan dalam perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan penyempurnaan pengelolaan PNPM Mandiri secara berkelanjutan.
- Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan berkaitan dengan permasalahan terkait pelaksanaan PNPM Mandiri dan dampak-dampaknya.

2.2. KERANGKA PERENCANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SPI PNPM MANDIRI

Gambar 2.
Kerangka Rencana Pembangunan SPI PNPM Mandiri 2008 dan 2009





Seperti dikemukakan pada bagian sebelumnya, terdapat dua tahapan utama dalam kegiatan pengembangan SPI PNPM Mandiri, yaitu tahap konsolidasi antar sistem informasi dan tahap integrasi secara keseluruhan (lihat Gambar 2). Kegiatan pada masing-masing tahap tersebut adalah sebagai berikut:

2.3. TAHAPAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN INFORMASI PNPM MANDIRI

2.3.1. Tahap Konsolidasi

1. Standardisasi Kode Lokasi dan Kegiatan Lapangan (*lihat lampiran 3*)

Tujuan dari tahap ini adalah untuk mendapatkan kode lokasi standar, sehingga data program yang berkaitan dengan lokasi tersebut hanya akan dikaitkan dengan 1 (satu) identitas (ID) yang unik dan sama. Begitu juga dengan penyeragaman kodifikasi untuk setiap kegiatan di lapangan. Dengan terbentuknya kode standar lokasi dan kegiatan yang bisa disepakati, proses konsolidasi data pada tahap selanjutnya dapat mewujudkan interkoneksi data antar program dan lembaga sekaligus untuk memudahkan pengumpulan dan analisa data

2. Standardisasi data gabungan

PNPM Mandiri, akan disusun oleh komponen program-program yang sebagian telah berjalan sebelum kerangka kebijakan payung PNPM Mandiri dicetuskan. Dalam pelaksanaannya, program-program tersebut berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan waktu, lokasi, dan kondisi daerah sasaran masing-masing program. Hal ini berarti keberagaman mekanisme pengelolaan masih terjadi, sehingga apabila akan diintegrasikan secara menyeluruh di tingkat pusat, perlu waktu dan persiapan yang cukup.

3. Komitmen Pedoman Pelaksanaan Pendataan Bersama (SOP)

Upaya mensinergikan kinerja pendataan PNPM Mandiri sangat memerlukan komitmen untuk membentuk dan mengikuti aturan yang akan mengarahkan dan menyamakan proses dan cara



pendataan. Dengan pedoman pelaksanaan pendataan diharapkan akan memperjelas tugas, tanggungjawab dan waktu penyelesaian pendataan sehingga perencanaan dapat lebih terukur keberhasilannya.

Pedoman Pelaksanaan Pendataan perlu diikuti dengan pembuatan aturan teknis mengenai penanggung jawab lapangan, format data yang akan dikirim, proses pengiriman dan batas waktu periode pengiriman.

4. Konversi dan pengumpulan laporan

Data yang telah dimiliki oleh setiap program perlu dikonversi sesuai dengan format data yang disepakati dalam pedoman ini. Apabila dalam periode saat ini terdapat data yang belum bisa diakomodasi, maka program tersebut harus mulai membuat proses perubahan dalam sistem manual di lapangan. Diharapkan pada awal tahun 2009 semua data telah selesai dikonversi ke dalam format yang disepakati dalam pedoman ini.

Untuk pengumpulan data atau laporan dan konversinya ke dalam format yang disepakati selama periode konsolidasi akan difasilitasi oleh bantuan jasa konsultan independen yang diadakan oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri. Konsultan independen tersebut juga bertugas melakukan audit data dan membuat sistem konversi data dan pelaporandata dari setiap program. Data yang telah terkumpul tersebut akan dikonsolidasikan lebih lanjut ke dalam satu kesatuan database PNPM Mandiri.

5. Aplikasi pelaporan & Analisa

Setelah data terkumpul, diperlukan suatu aplikasi yang dapat menjembatani berbagai keperluan agatu kegunaan yang lebih khusus, seperti misalnya laporan untuk presiden, konsumsi publik, keperluan pelaksana/pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Aplikasi tersebut juga digunakan untuk keperluan analisa data dan memantau perkembangan pelaksanaan program sehingga akuntabilitas dari program PNPM Mandiri dapat ditingkatkan.



2.3.2. Tahap Pengintegrasian Pendataan

1. Standarisasi mekanisme dan proses pendataan

Proses sistem manual di lapangan pada tahun 2008 sudah harus mulai mengakomodasi format baku yang sama. Sehingga diharapkan penggunaan aplikasi dan mekanisme pendataan pada tahun 2009 seragam/standar dapat diberlakukan serentak di semua wilayah PNPM Mandiri. Dengan penyamaan aplikasi dan format, diharapkan dapat mempermudah koordinasi dan pelaporan sehingga lebih cepat dan efisien.

Perubahan dalam pengembangan kedepan perlu memperhitungkan kebutuhan biaya dan tenaga yang kemungkinan sangat besar. Untuk itu, pada tahap pengintegrasian pendataan akan dilakukan uji coba sistem di suatu wilayah percontohan untuk mengetahui perubahan atau perbaikan yang diperlukan dalam kerangka pengembangan sistem informasi PNPM Mandiri secara utuh.

2. Meningkatkan administrasi proyek yang lebih terintegrasi dengan SPI

Selain aplikasi pendataan di atas, yang perlu dibangun secara paralel adalah sistem administrasi proyek yang lebih terintegrasi antar program untuk menghindari konflik yang mungkin muncul. Administrasi tersebut meliputi: sistem sumber daya manusia (fasilitator dan konsultan), sistem pencairan dana, sistem pengaduan, dan sistem lain yang mendukung pelaksanaan program. Perubahan atau penyesuaian sistem administrasi ini akan dilakukan secara tersendiri.



3.1 KETENTUAN UMUM

Sistem Pengelolaan Informasi (SPI) PNPM Mandiri ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pemantauan dan evaluasi pencapaian pelaksanaan program-program PNPM Mandiri di lapangan melalui mekanisme pengelolaan data dan informasi yang terpadu.

Strategi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi melalui SPI PNPM Mandiri akan dilakukan secara menyeluruh dan berjenjang. Strategi dilakukan secara berjenjang dengan pengawasan pengumpulan data serta penilaian kualitas data dilakukan mulai dari tingkatan koordinasi yang paling bawah, yaitu Desa/Kelurahan, menuju ke tingkatan selanjutnya yang lebih tinggi. Strategi tersebut akan diberlakukan untuk masing-masing program PNPM Mandiri.

Pendekatan berjenjang yang digunakan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri melalui SPI adalah sebagai berikut:

- o Pada tingkat Desa/Kelurahan, dan tingkat Kecamatan; masing-masing program sektor melakukan pengumpulan data dan informasi langsung dari lapangan, terkait proses dan hasil proses kegiatan masing-masing program.
- o Pada tingkat Kabupaten, tingkat Propinsi dan tingkat Nasional; masing-masing program sektor melakukan konsolidasi pengumpulan data dan informasi langsung dari lapangan (sekiranya ada), atas proses dan hasil proses kegiatan dari subordinat di bawahnya.
- o Pada tingkat koordinasi PNPM Mandiri; akan dilakukan koordinasi dan konsolidasi data dan informasi terhadap proses dan hasil proses seluruh program di tingkat nasional berdasarkan kerangka logis PNPM Mandiri, untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi lebih lanjut. termasuk atribut data pelengkap untuk diterapkan dalam analisa data spasial berbasis teknologi GIS (*Geographical Information System*).



- Kegiatan SPI PNPM Mandiri ini akan menggunakan instrumen Daftar Isian SPI (*MIS Log-book*) untuk pengumpulan data, yang dititikberatkan tiga hal, yaitu: a) pelaksanaan siklus tahapan kegiatan; b) keluaran hasil investasi; dan c) pengelolaan dana bantuan. Daftar isian SPI atau *MIS Log-book* tersebut selanjutnya dapat disesuaikan dengan kegiatan atau kebutuhan masing-masing program disamping tujuan utamanya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan informasi SPI PNPM Mandiri.
- Pelaksanaan kegiatan SPI ini memuat proses validasi dan verifikasi data untuk menjamin kualitas data dan informasi yang disajikan untuk SPI PNPM Mandiri. Kegiatan pemutakhiran data SPI dilakukan secara periodik setiap bulannya.

3.2. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PNPM MANDIRI

- Pemantauan adalah pengumpulan data secara berkala dan tepat waktu untuk menentukan apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pemantauan merupakan proses yang berjalan terus menerus selama siklus proyek, dari pelatihan dan sosialisasi, hingga perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan. Hasil pemantauan digunakan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan dan menyesuaikan perencanaan. Evaluasi adalah penilaian secara berkala apa yang telah dihasilkan, untuk mengetahui apakah sebuah proyek berhasil mencapai tujuannya.
- Pemantauan dan evaluasi melalui SPI dilakukan dalam rangka pengumpulan data dari proses serta hasil proses dari masing-masing program di bawah payung PNPM, sehingga menjadi informasi yang berguna bagi pemantauan dan evaluasi untuk PNPM Mandiri. Beberapa prinsip yang diterapkan adalah sebagai berikut:
 1. Tepat Waktu. Pemutakhiran data SPI harus dilaksanakan tepat waktu, sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan untuk memberikan masukan bagi peningkatan atau perbaikan kualitas kegiatan selanjutnya.



2. Realistis dan Sistematis. Pemutakhiran data SPI dilaksanakan secara sistematis mulai dari tingkat desa/kecamatan sampai dengan jenjang sub-ordinat di atasnya.
3. Dapat Dipercaya dan Diandalkan. Hasil pemutakhiran data SPI akan digunakan sebagai referensi dalam pengukuran indikator kinerja program serta penyusunan strategi lebih lanjut. Proses validasi serta verifikasi oleh pelaku pemutakhiran data akan disertakan dalam proses ini, untuk mendapatkan tingkat akurasi data dan informasi yang lebih baik.

3.3. MATERI PEMANTAUAN DAN EVALUASI MELALUI SPI

- Materi pemantauan dan evaluasi melalui SPI pelaksanaan PNPM disajikan dalam lembar Daftar Isian SPI (*Log Book*) yang materinya digali di lapangan, mencakup data serta informasi sebagai berikut:
 1. Informasi pelaksanaan siklus tahapan kegiatan di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi, tergantung ketentuan pada masing-masing program.
 2. Data keluaran hasil investasi.
 3. Data pengelolaan dana bantuan.
 4. Data atribut untuk mengukur indikator kinerja.
 5. Data atribut untuk pemutakhiran data keruangan/*GIS*.

3.4. METODE PEMANTAUAN DAN EVALUASI MELALUI SPI

- Secara aktif, metode pemantauan dan evaluasi akan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan berikut:
 1. **Pengumpulan data dan informasi di lapangan**. Metode ini dilaksanakan di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi secara langsung terhadap proses yang terjadi di lapangan, dengan menggunakan Daftar Isian SPI (*Log-book*). Proses pengumpulan data ini harus disertai oleh data pendukung yang sesuai dengan tahapan kegiatannya (contoh: Berita Acara Kegiatan, Daftar Peserta Pertemuan, dan lain-lain).



2. Pengumpulan data dan informasi ke sub-ordinat di atasnya.

Metode ini dilaksanakan secara berkala dan berjenjang, rutin untuk setiap bulan. Untuk menjamin kualitas data yang didapat, validasi dan verifikasi data akan dilakukan di setiap tingkat. Mekanisme untuk metode ini dapat disesuaikan berdasarkan kebijakan masing-masing program yang berada di bawah payung PNPM.

3. Validasi dan verifikasi data dan informasi. Metode ini diberlakukan secara berjenjang untuk menjaga kualitas data dan informasi yang dikumpulkan, umpan-balik penjagaan akurasi data berdasarkan fakta kegiatan di lapangan, konsistensi isi dan struktur data terhadap pemutakhiran yang dilakukan sebelumnya, serta untuk menelusuri kemungkinan adanya anomali data.

4. Penyajian data dan informasi ke dalam SPI PNPM Mandiri.

Metode ini dilaksanakan dengan menggabungkan data serta informasi dari SPI masing-masing program dengan menggunakan data dan informasi inti yang dibutuhkan SPI PNPM Mandiri; untuk mengukur indikator kinerja dalam kerangka logis PNPM Mandiri, pemanfaatan data atribut untuk pemantauan dan evaluasi, serta presentasi berskala keruangan/GIS. Penggabungan ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi khusus yang dapat mengagregat data dari beberapa aplikasi SPI yang berjalan di masing-masing program, dan menggabungkannya dalam sebuah pemaparan.

3.5. PELAPORAN DARI HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI MELALUI SPI

- Pelaporan dari hasil pemantauan dan evaluasi melalui SPI ditampilkan secara berkala setiap bulannya di website PNPM Mandiri. Hasil pemantauan untuk masing-masing program dikompilasi di tingkat nasional untuk setiap program, dengan status terakhir setiap bulannya adalah tanggal terakhir di bulan tersebut dan dilaporkan ke SPI PNPM Mandiri setiap tanggal 10 bulan berikutnya.



- Hasil kompilasi yang sudah masuk ke dalam SPI PNPM Mandiri selanjutnya diolah sesuai dengan pelaporan yang sudah disepakati, dan akan ditampilkan di website pada setiap tanggal 15 bulan yang bersangkutan.
- Laporan hasil pemantauan dan evaluasi melalui SPI yang akan ditampilkan di dalam website PNPM Mandiri adalah:
 - a. Tabel capaian indikator kinerja berdasarkan kerangka logis PNPM Mandiri (yang untuk selanjutnya dapat di bagi per program, dan atau per wilayah)
 - b. Tahapan pelaksanaan siklus kegiatan di lapangan berdasarkan *master schedule* yang sudah disepakati
 - c. Atribut pemantauan dan evaluasi lain berdasarkan pelaksanaan siklus kegiatan, keluaran hasil investasi dan pengelolaan dana bantuan yang dapat disajikan dalam bentuk profil (yang untuk selanjutnya dapat dibagi per program, dan atau per wilayah)
 - d. SPI berbasis internet yang dapat menyajikan informasi lain yang dibutuhkan berdasarkan *query* data yang dilakukan secara *real-time*.
 - e. Peta sebaran pelaksanaan program disajikan melalui pemanfaatan Sistem Informasi Geografi (*GIS*), yang akan dikembangkan secara terpisah. SPI akan berperan sebagai penyedia data atribut dan informasi dalam proses tersebut.
 - f. Analisis dari capaian pelaksanaan yang digunakan sebagai referensi untuk pengambilan keputusan strategis di tingkat eksekutif disajikan oleh EIS (*Executive Information System*). EIS akan dikembangkan secara terpisah, dengan SPI sebagai penyedia data atribut dan informasi dalam proses tersebut.

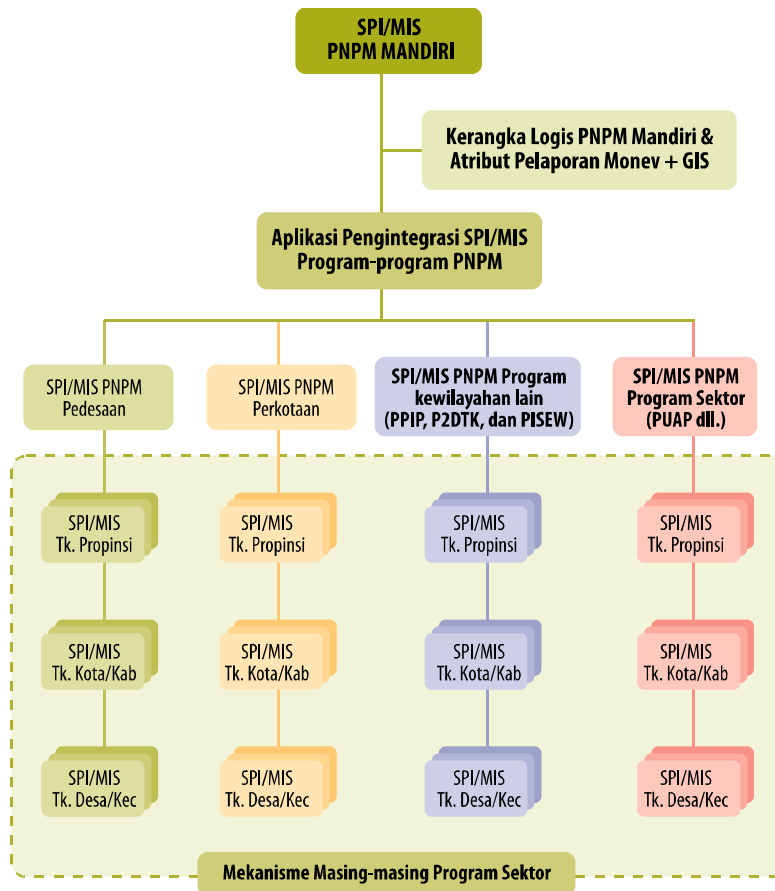




Pedoman Pelaksanaan pengelolaan informasi (SPI) PNPM Mandiri disusun untuk menjadi acuan pelaksanaan dan pengembangan sistem pengelolaan informasi PNPM Mandiri. Ketentuan, mekanisme dan prosedur lebih lanjut dari pedoman pelaksanaan pengelolaan informasi (SPI) PNPM Mandiri akan diatur dalam petunjuk teknis operasional masing-masing program PNPM Mandiri dan Petunjuk Teknis Operasional Pelatihan Sistem Pengelolaan Informasi PNPM Mandiri untuk Fasilitator..

Apabila di kemudian hari diperlukan perubahan terhadap pedoman pelaksanaan ini, maka perubahannya perlu mendapat persetujuan Tim Pengendali PNPM Mandiri Pusat.





Tata cara Pelaksanaan Operasional SPI/MIS

No	KEGIATAN	PELAKU	HASIL	KETERANGAN
Tahap Persiapan				
1	Diseminasi & Sosialisasi Konsep SPI/MIS dan Mekanisme pengelolaan SPI/MIS PNPM kepada Koordinator Provinsi, Koordinator Kabupaten/Kota dan TA Koordinator Provinsi	Pelaksana: Tim Pusinfo KMP Peserta : Koordinator Provinsi, Koordinator Kabupaten/Kota, dan TA-TA Koordinator Provinsi Fasilitator : KMP	Pelaku PNPM di tingkat Koordinator Provinsi dan Koordinator Kabupaten/Kota paham dan mengerti tentang konsep dan mekanisme pengelolaan SPI/MIS ditingkat Koordinator Provinsi maupun Koordinator Kabupaten/Kota	Pemahaman konsep dan mekanisme SPI/MIS PNPM disampaikan kepada pelaku PNPM di tingkat Koordinator Provinsi maupun Koordinator Kabupaten/Kota pada saat mobilisasi awal (Pelatihan Para Tugas Koordinator Provinsi)
2	Mobilisasi Operator Komputer Koordinator Provinsi dan Koordinator Kabupaten/Kota	Pelaksana: Koordinator Provinsi Fasilitator : KMP	<ul style="list-style-type: none"> Operator Komputer tingkat Koordinator Provinsi yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan dan pengendalian data base Operator Komputer tingkat Koordinator Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan dalam menjalankan aplikasi SPI/MIS PNPM dan berkoordinasi dengan Fasilitator Desa/Kelurahan 	Dilakukan sedini mungkin setelah mobilisasi TA-TA Koordinator Provinsi untuk menghindari kehilangan data dari kegiatan-kegiatan awal Koordinator Provinsi dan Koordinator Kabupaten/Kota
Tahap Persiapan Pelatihan Pelaku SPI/MIS PNPM				
3.	Persiapan Pelatihan.	Pelaksana: KMP	<ul style="list-style-type: none"> TOR Pelatihan SPI/MIS Bahan-bahan Pelatihan Undangan Pelatihan 	
4.	Persiapan Sarana dan prasarana Operasional SPI/MIS di tingkat Koordinator Provinsi dan Koordinator Kabupaten/Kota	Pelaksana: Koordinator Provinsi Fasilitator : KMP	<ul style="list-style-type: none"> Di tingkat Koordinator Provinsi minimal 1 Unit PC dengan spesifikasi minimal Pentium IV, 3.8 GHz (gigahertz) hard disk 100 GB Di tingkat Koordinator Kabupaten/Kota minimal 2 Unit PC dengan spesifikasi minimal Pentium IV, 3.8 GHz hard disk 100 GB. 	Pengadaan dilakukan sejak mobilisasi Operator Komputer



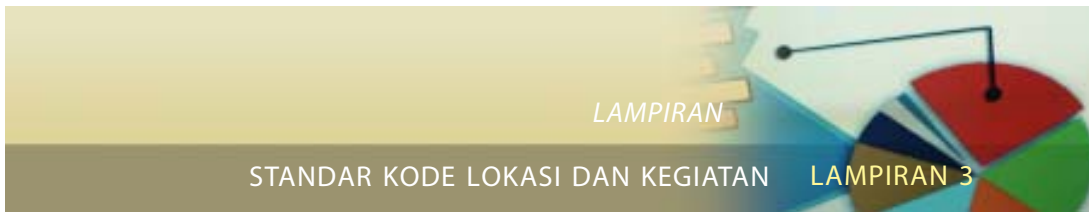
No	KEGIATAN	PELAKU	HASIL	KETERANGAN
Tahap Pelaksanaan Pelatihan SPI/MIS PNPM				
5.	Pemahaman Konsep dan Mekanisme Pengelolaan SPI/MIS PNPM di tingkat Koordinator Kabupaten/Kota	Pelaksana: KMP Peserta: Operator Komputer Fasilitator: Koordinator Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> Dipahaminya Konsep SPI/MIS oleh peserta pelatihan Dipahaminya mekanisme pengelolaan SPI/MIS PNPM di tingkat Koordinator Kabupaten/Kota 	WORKSHOP SPI/MIS
6.	Pemahaman Glossary SPI/MIS PNPM Reguler dan Rasio Indikator PNPM	Pelaksana: KMP Peserta: Operator Komputer Fasilitator: KMP	<ul style="list-style-type: none"> Dipahaminya Glossary SPI/MIS PNPM Reguler Dipahaminya rasio indikator PNPM dan mengetahui cara menghitung rasio indikator tersebut 	WORKSHOP SPI/MIS
7.	Pemahaman tentang Format-format SPI/MIS	Pelaksana: KMP Peserta: Operator Komputer Fasilitator: KMP	<ul style="list-style-type: none"> Dipahaminya format-format SPI/MIS PNPM oleh para peserta pelatihan dan mengerti bagaimana proses pengisian format SPI/MIS Tersedianya format-format SPI/MIS bagi Tim Fasilitator Dipahaminya mekanisme verifikasi data 	WORKSHOP SPI/MIS
8.	Mekanisme pengelolaan Data di tingkat Koordinator Kabupaten/Kota dan Provinsi	Pelaksana: Tim SPI/MIS KMP Peserta: Operator Komputer	<ul style="list-style-type: none"> Dipahaminya mekanisme pengelolaan data di tingkat Koordinator Kabupaten/Kota Dipahaminya mekanisme pengelolaan data di tingkat Koordinator Provinsi 	WORKSHOP SPI/MIS
9.	Pelatihan Teknis Operasional Aplikasi SPI/MIS Pemberdayaan Masyarakat (SPI/MIS PM)	Pelaksana: Tim SPI/MIS KMP Peserta: Operator Komputer	<ul style="list-style-type: none"> Dipahaminya seluruh fitur Aplikasi Pemberdayaan Masyarakat Dipahaminya teknis operasional Aplikasi SPI/MIS Aplikasi Pemberdayaan Masyarakat 	WORKSHOP SPI/MIS
10.	Pelatihan Teknis Operasional Aplikasi SPI/MIS Pengelolaan dana BLM (SPI/MIS BLM)	Pelaksana: Tim SPI/MIS KMP Peserta: Operator Komputer	<ul style="list-style-type: none"> Dipahaminya seluruh fitur Aplikasi Pengelolaan Dana BLM Dipahaminya teknis operasional Aplikasi SPI/MIS Aplikasi Pengelolaan Dana BLM 	WORKSHOP SPI/MIS
11	Pengendalian Kualitas Data SPI/MIS	Pelaksana: Tim SPI/MIS KMP Peserta: Operator Komputer	<ul style="list-style-type: none"> Dipahaminya Konsep Pengendalian Kualitas Data SPI/MIS Dipahaminya pentingnya pengendalian data di tingkat Koordinator Provinsi Dipahaminya proses pengendalian kualitas Data SPI/MIS di tingkat Koordinator Provinsi Dipahaminya teknik pengoperasian aplikasi untuk pengendalian kualitas data SPI/MIS 	WORKSHOP SPI/MIS

LAMPIRAN

No	KEGIATAN	PELAKU	HASIL	KETERANGAN
Tahap Implementasi SPI/MIS PNPM				
12	Proses Pengisian Format-format SPI/MIS	Pelaksana: Tim Fasilitator Kecamatan Verifikasi : Koordinator Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Terisinya item data sesuai dengan Format SPI/ MIS yang berlaku di SPI/MIS PNPM • Tanda tangan Senior FD/Fasilitator Kecamatan sebagai penanggung jawab entri data 	continue
13	Proses Verifikasi Data dalam Format Isian SPI/MIS	Pelaksana: Koordinator Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Tanda tangan Koordinator Kabupaten/Kota dalam format SPI/MIS sebagai bukti Koordinator Kabupaten/Kota melakukan verifikasi • Data Valid antara data dalam Format SPI/MIS dengan data Lapangan berdasarkan cross check data yang dilakukan rutin oleh Koordinator Kabupaten/Kota 	continue
14	Proses Entri Data SPI/ MIS ke dalam Aplikasi SPI/MIS tingkat Koordinator Kabupaten/Kota dan pengiriman export data ke Koordinator Provinsi	Pelaksana: Operator Komputer Koordinator Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Terupdatenya database SPI/MIS PNPM tingkat Koordinator Kabupaten/Kota • Profile Desa/Kelurahan tingkat Koordinator Kabupaten/Kota • Profile Desa/Kelurahan tingkat Kab/ Kota • Tanda Tangan Operator Komputer Koordinator Kabupaten/Kota sebagai bukti data sudah di-entri ke dalam aplikasi SPI/MIS • Database Export tingkat Koordinator Kabupaten/Kota • Arsip Format-format SPI/MIS • Kelengkapan Pengisian data selalu termonitor 	15 pertengahan bulan dan 30/31 akhir bulan
15	Proses Entri Data SPI/ MIS ke dalam Aplikasi SPI/MIS tingkat Koordinator Provinsi dan pengiriman export data ke KMP	Pelaksana: Operator Komputer Koordinator Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Terupdate nya database SPI/MIS PNPM tingkat Koordinator Provinsi • Profile Desa/Kelurahan tingkat Koordinator Kabupaten/Kota • Profile Desa/Kelurahan tingkat Koordinator Provinsi • Profile Desa/Kelurahan tingkat Kab/ Kota • Database Export tingkat Koordinator Provinsi 	16 continue dan 1 continue
16	Pengendalian Kualitas Data SPI/MIS tingkat Koordinator Provinsi	Pelaksana: Operator Komputer Koordinator Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Data base Koordinator Provinsi bebas Anomali • Data base Koordinator Provinsi bebas Inkonsistensi 	16 continue dan 1 continue



No	KEGIATAN	PELAKU	HASIL	KETERANGAN
17.	Proses Rekonsiliasi Data Tingkat Nasional	Pelaksana: Operator Komputer KMP	<ul style="list-style-type: none"> • Terupdatenya database SPI/MIS PNPMP tingkat Nasional • Profile Desa/Kelurahan tingkat Koordinator Kabupaten/Kota • Profile Desa/Kelurahan tingkat Koordinator Provinsi • Profile Desa/Kelurahan tingkat Kab/ Kota • Profile Desa/Kelurahan tingkat Propinsi • Profile Desa/Kelurahan tingkat Nasional 	16 – 20 continue dan 1 – 6 continue
18.	Pengendalian Kualitas Data SPI/MIS tingkat Nasional	Pelaksana: Operator Komputer KMP	<ul style="list-style-type: none"> • Data base Nasional bebas Anomali • Data base Nasional bebas Inkonsistensi 	20 continue dan 8 – 9 continue
19	Uploading Informasi SPI/MIS PNPMP ke Web Site PNPMP	Pelaksana: Operator Komputer KMP	<ul style="list-style-type: none"> • Tersajinya Profile Desa/Kelurahan di web site PNPMP • Tersajinya Profile PNPMP tingkat Propinsi di web site PNPMP • Tersajinya Profile PNPMP tingkat Nasional di web site PNPMP 	10 continue
20.	Interpretasi Data SPI/MIS dan Analisis Data SPI/MIS	Pelaksana: Monev Koordinator Provinsi, Monev KMP.	<ul style="list-style-type: none"> • Diperoleh hasil interpretasi Data SPI/MIS PNPMP di semua tingkatan • Diperolehnya gambaran wilayah-wilayah sebagai masukan kegiatan uji petik 	11 - 15
Arsip Data dan Back Up Data SPI/MIS PNPMP				
21.	Arsip SPI/MIS	Pelaksana: Operator Komputer KMP	<ul style="list-style-type: none"> • Dihasilkannya Arsip Profile PNPMP tingkat desa/ kelurahan, Kab/ Kota, Propinsi dan Nasional di web site PNPMP untuk periode sebelumnya 	Tiap bulan (Continue)
22.	Back Up Data SPI/MIS	Pelaksana: Operator Komputer KMP, Operator Komputer Koordinator Provinsi dan Operator Komputer Koordinator Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Dihasilkannya Arsip baik format isian maupun soft copy database SPI/MIS setiap periode pada masing-masing tingkatan pelaku SPI/MIS 	Setiap Periode tertentu (diatur dlm surat KMP)



Standar Kode Lokasi dan Kegiatan

I. DATABASE

A. Data master lokasi BPS dan strukturnya

M_Lokasi

Kode: Double
Lokasi: Text(30)
Level: Byte
Status: Text(50)
LocationP2KP_ID: Doub

Untuk menyimpan lokasi data lokasi standar sehingga data yang berhubungan dengan lokasi tersebut merupakan lokasi yang sama. Diharapkan dengan menyamakan lokasi tersebut dapat diambil manfaat yaitu :

- interkoneksi dengan data yang dimiliki antar lembaga
- memudahkan pengumpulan dan analisa data
- menghindari kesalahan pengetikan nama lokasi

Data yang disimpan untuk semua jenis level, di mana data mulai dari nasional sampai desa/kelurahan disimpan dalam tabel yang sama. Diharapkan dengan sistem penyimpanan ini diharapkan dapat memudahkan atau menyederhanakan penyimpanan data untuk level lokasi cakupan yang berbeda misalnya proyek berbasis kecamatan atau proyek berbasis kelurahan bisa di akomodasi.

Daftar Fields :

1. Kode

- Penjelasan : Pengodean lokasi dengan format yang sama dengan pengodean milik BPS.
- Format : aabbccddd (Di simpan dalam tipe Text)



- aa : 2 digit kode untuk propinsi
 - bb : 2 digit kode untuk kabupaten
 - ccc : 3 digit kode untuk kecamatan
 - ddd : 3 digit kode untuk desa/kelurahan
 - Contoh : 3573040004 → Kelurahan Bunulrejo
 - 35 : Propinsi Jawa Timur
 - 30 : Kota Malang
 - 040 : Kecamatan Belimbing
 - 004 : Kelurahan Bunulrejo
2. Lokasi
- Penjelasan : Detil nama lokasi dari nomor pengodean di atas
 - Format : Maksimum 30 karakter
 - Contoh : "BUNULREJO"
3. Level
- Penjelasan : Level dari jenis kode yang ada
 - Format :
 - 0 → Nasional
 - 1 → Propinsi
 - 2 → Kabupaten / Kota
 - 3 → Kecamatan
 - 4 → Desa/Kelurahan
4. Status
- Penjelasan : Asal nomor pengodean diperoleh
 - Format :
 - 0 → Khusus untuk lokasi yang baru dibuat sendiri (belum terdaftar di BPS)
 - > 0 → menandakan tahun kode BPS misalnya 5 diambil dari BPS tahun 2005

5. LokasiP2KP_ID

- Penjelasan : Nomor link dengan kode yang dimiliki oleh P2KP (opsional untuk konversi dengan data yang telah dimiliki P2KP)
6. Perlu ditambahkan 1 kolom/field untuk membedakan di level 2, apakah termasuk kabupaten atau kota serta di level 4, apakah desa atau kelurahan

Contoh data :

M_Lokasi				
Kode	Lokasi	Level	Status	LocationP2KP_ID
000000000	INDONESIA	0	5	
110000000	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	1	5	
110100000	KAB. SIMEULUE	2	5	
110101000	TEUPAH SELATAN	3	5	
110101001	LATIUNG	4	5	
110101002	LABUHAN BAJAU	4	5	
110101003	SUAK LAMATAN	4	5	
110101004	ANA AO	4	5	
110101005	LATALING	4	5	
110101006	PULAU BENGKALAK	4	5	

B. Data master Kegiatan PNPM 2008

M_Lokasi

Kegiatan ID: Long Integer
 Deskripsi: Text(50)
 Jenis: Byte
 Satuan_kode: Byte
 Detil: Text(50)
 Level: Byte
 ParentID: Long Integer



Untuk menyimpan data jenis-jenis kegiatan yang mungkin ada dalam PNPM dan menggolongkannya ke dalam 3 tingkat, penggolongan ini digunakan untuk mempermudah pencarian dan penelusuran item kegiatan yang ada.

Daftar Fields :

1. Kegiatan_ID

- Penjelasan : Pengodean nomor kegiatan dengan menggunakan 3 level pengelompokan
- Format : aabbcc
aa : 2 digit kode Departemen
bbb : 3 digit kode Program
ccc : 3 digit kode Kegiatan
- Contoh : 03001001 → Ruang Kelas
03 : Departemen Pendidikan
001 : Program Gedung Sekolah
001 : Kegiatan Ruang Kelas

2. Deskripsi

- Penjelasan : merupakan penjelasan singkat tentang kegiatan.
- Format : Maksimum 50 karakter
- Contoh : "Pembangunan ruangan kelas siswa."

3. Jenis

- Penjelasan : untuk menggolongkan pembangunan bersifat fisik atau non fisik
- Format : Numerik (byte)
0 : untuk label saja (khusus untuk level Departemen dan Program)
1 : Fisik
2 : Non Fisik

4. Satuan_kode

- Penjelasan : untuk menyatakan besaran ukuran yang akan dicatat

sehingga dapat menyamakan acuan ukuran / satuan dari proyek.

- Format : Numerik dan disimpan dalam tabel lain sebagai lookup yaitu tabel "M_Satuan" sehingga memudahkan untuk menambahkan satuan bila belum ada.

M_satuan		
Kode	Satuan	Detil
10	orang	Jumlah orang
20	unit	Jumlah unit
30	m	meter panjang
40	m2	meter persegi
50	m3	meter kubik
60	Rp	Rupiah
70	HOK	Hari-orang-kerja

5. Detil

- Penjelasan : merupakan penjelasan detil tentang kegiatan yang dimaksud sehingga memudahkan untuk dibuat sebagai dokumentasi
- Format : Maksimum 50 karakter (bila diperlukan dapat dibesarkan)
- Contoh : "Pembangunan ruangan kelas siswa dengan ukuran ruangan standar minimal 5 m x 8 m dan dikantakan dalam satuan ruangan"

6. Level

- Penjelasan : Level dari jenjang kegiatan
- Format :
 - 1 → Departemen
 - 2 → Program
 - 3 → Kegiatan

7. ParentID

- Penjelasan : Untuk melihat induk dari setiap kegiatan (opsional digunakan untuk keperluan filter aplikasi)



Contoh tabel :

M_Kegiatan

Kegiatan_Kode	Diskripsi	Jenis	Satuan_kode	Detil	Level	Parent_ID
01000000	Ekonomi				1	
01001000	Bantuan Langsung				2	01000000
01001001	Santunan orang miskin	F	orang		3	01001000
01001002	Subsidi pasar murah	F	orang		3	01001000
01002000	Dana Bergulir				2	01000000
01002001	Industri Rumah Tangga	N	unit		3	01002000

C. Data master laporan realisasi (Contoh)

T_Realisasi

Lokasi_Kode: Double
Kegiatan_Kode: Long Integer
Pelaksana_Kode: Integer
Jenis_Kode: Byte
Jumlah: Double
DanaBLM: Currency
DanaDaerah: Currency
DanaMasyarakat: Currency
DanaLainnya: Currency
TglRealisasi: Date/Time
Keterangan: Tect(200)
Last_Update: Date/Time

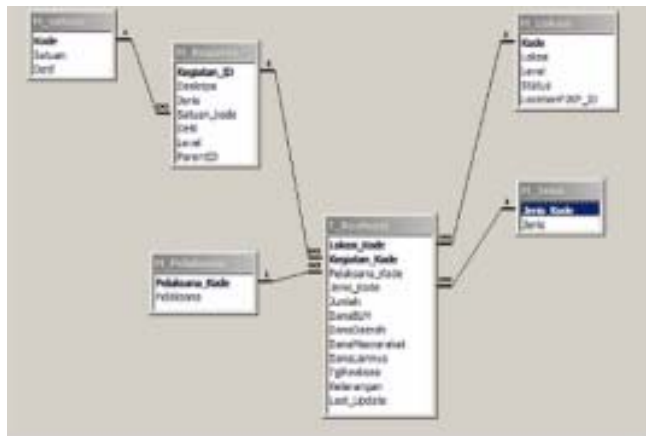
Digunakan untuk pencatatan kegiatan / proyek yang telah dilakukan di lapangan, tabel dan nama fields yang ada masih bersifat contoh, perlu koordinasi lebih lanjut antar pelaksana proyek sehingga bisa digunakan acuan minimal data yang harus dikirimkan ke pusat dalam melaporkan kegiatan yang telah berlangsung.

Tabel sejenis dapat dibuat untuk pencatatan kebutuhan / rencana / RPJM dari proyek. Disarankan untuk menambahkan kode atau penomoran proyek (setiap lokasi yang mendapat suatu proyek diberikan kode unik

sehingga bila terjadi perubahan lokasi karena pemekaran atau pun lainnya dapat ditangani dengan lebih baik.

Tabel ini dapat dihasilkan dengan mengisi langsung maupun konversi dari tabel yang mungkin telah dimiliki pelaksana PNPM.

II. PENDEKATAN STRUKTUR DAN REALISASI



III. PROTOTYPE TAMPILAN MASUKAN UNTUK PENCATATAN REALISASI KEGIATAN

Contoh gambaran awal pemasukan data aplikasi dengan menggunakan aplikasi sederhana MS Access.

A. Memasukkan kode lokasi:

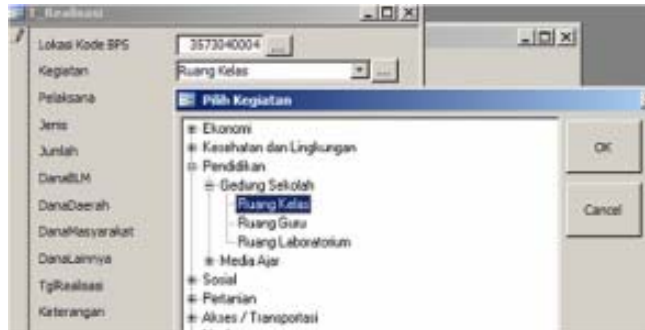
The screenshot shows a data entry window titled "Kode Wilayah (BPS)". The main window has a "Lokasi Kode BPS" field with the value "357304004". The sub-window contains the following fields:

- Propinsi: MALIA TRHU
- Kabupaten: KOTA MALANG
- Kecamatan: SLIMBING
- Kelurahan: BULAREJO

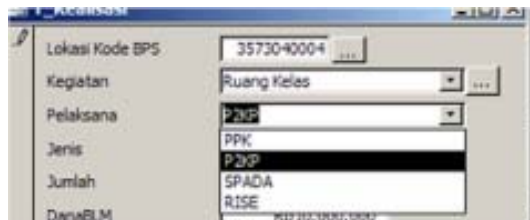
Buttons for "OK" and "Cancel" are visible at the bottom.



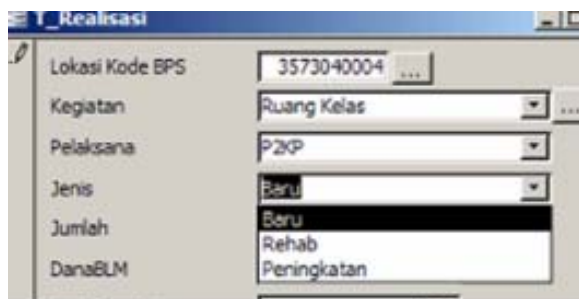
B. Memasukkan Daftar Kegiatan:



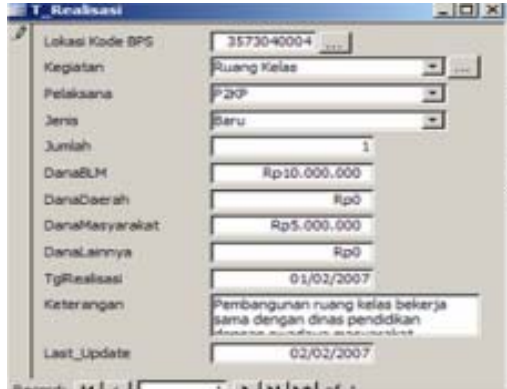
C. Memasukkan pelaksana PNPM:



D. Memasukkan Jenis Proyek:

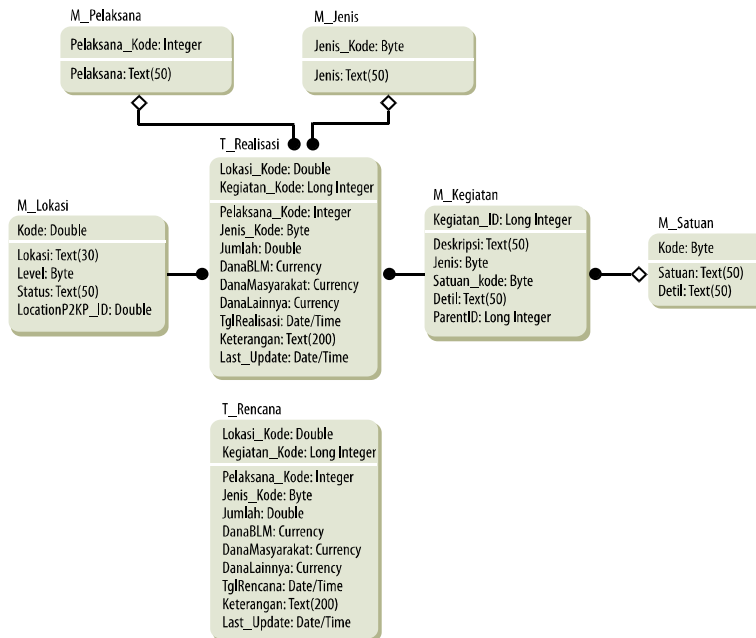


E. Keseluruhan tampilan:



F. Struktur, Data Master, dan Diagram Kegiatan

1. Struktur dan relasi data





2. Data master kegiatan PNPB 2008

M_Kegiatan						
Kegiatan_ID	Deskripsi	Jenis	Satuan_kode	Detail	Level	ParentID
01000000	Ekonomi				1	
01001000	Bantuan Langsung				2	01000000
01001001	Santunan orang miskin	F	orang		3	01001000
01001002	Subsidi pasar murah	F	orang		3	01001000
01002000	Dana Bergulir				2	01000000
01002001	Industri Rumah Tangga	N	unit		3	01002000
01002002	Usaha Mikro Kecil Menengah	N	unit		3	01002000
01002003	Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	N	unit		3	01002000
01002004	Simpan Pinjam	N	orang		3	01002000
01003000	Sarana Perdagangan				2	01000000
01003001	Pembangunan Pasar	F	unit		3	01003000
01003002	Tempat Pelelangan Ikan	F	unit		3	01003000
02000000	Kesehatan dan Lingkungan				1	
02001000	Kesehatan Masyarakat				2	02000000
02001001	Bangunan Posyandu	F	unit		3	02001000
02001002	Pengobatan Gratis	N	orang		3	02001000
02001003	Imunisasi	N	orang		3	02001000
02001004	Kesehatan Ibu dan Anak	N	orang		3	02001000
02001005	Perbaikan Gizi	N	orang		3	02001000
02002000	Sanitasi				2	02000000
02002001	Saluran Air Kotor	F	m		3	02002000
02002002	MCK	F	unit		3	02002000
02002003	Jamban Keluarga	F	unit		3	02002000
02002004	Tempat Pembuangan Sampah	F	unit		3	02002000
02003000	Air Bersih				2	02000000
02003001	Sumur Gali	F	unit		3	02003000
02003002	Sumur Pompa Tangan (SPT)	F	unit		3	02003000
02003003	Penampungan Air Hujan	F	unit		3	02003000
02003004	Hidran Umum	F	unit		3	02003000
02003005	Instalasi / Pipa air Bersih	F	unit		3	02003000
02003006	Bangunan Pelindung mata air (PMA)	F	unit		3	02003000
02003007	Penangkap Air Muka	F	unit		3	02003000
02004000	Rumah Sehat				2	02000000
02004001	Perbaikan Perumahan Sehat	F	unit		3	02004000
03000000	Pendidikan				1	
03001000	Gedung Sekolah				2	03000000
03001001	Ruang Kelas	F	unit		3	03001000
03001002	Ruang Guru	F	unit		3	03001000

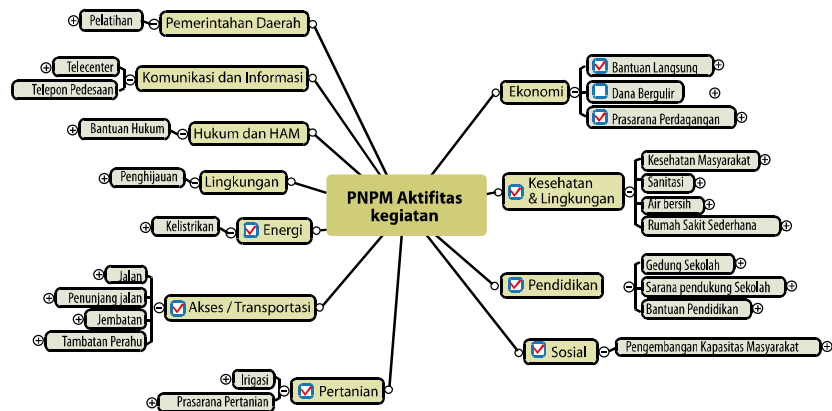
LAMPIRAN

M_Kegiatan						
Kegiatan_ID	Deskripsi	Jenis	Satuan_kode	Detail	Level	ParentID
03001003	Ruang Laboratorium	F	unit		3	03001000
03002000	Media Ajar				2	03000000
03002001	Pengadaan Buku	F	unit		3	03002000
04000000	Sosial				1	
04001000	Pengembangan Kapasitas Masyarakat				2	04000000
04001001	Pelatihan Pertanian	N	orang		3	04001000
04001002	Pelatihan Peternakan	N	orang		3	04001000
04001003	Pelatihan Pertukangan	N	orang		3	04001000
04001004	Pelatihan Pendidikan	N	orang		3	04001000
04001005	Pelatihan Kesehatan	N	orang		3	04001000
04001006	Pelatihan Keselamatan	N	orang		3	04001000
04001007	Pelatihan Ketrampilan(Life Skill)	N	orang		3	04001000
05000000	Pertanian				1	
05001000	Irigasi				2	05000000
05001001	Saluran Irigasi	F	m		3	05001000
05001002	Embung / Bendungan Sederhana	F	unit		3	05001000
05001003	Sumur Artesis	F	unit		3	05001000
05001004	Bangunan pembagi / Pintu Air	F	unit		3	05001000
05001005	Bangunan Pengambil Bebas	F	unit		3	05001000
06000000	Akses / Transportasi				1	
06001000	Jalan				2	06000000
06001001	Jalan Tanah	F	m		3	06001000
06001002	Perkerasan Beton	F	m		3	06001000
06001003	Perkerasan Sirtu	F	m		3	06001000
06001004	Perkerasan Telford	F	m		3	06001000
06001005	Perkerasan Telasah	F	m		3	06001000
06001006	Jalan Makadam	F	m		3	06001000
06001007	Perkerasan Aspal	F	m		3	06001000
06001008	Perkerasan Conblock	F	m		3	06001000
06001009	Jalan lapen(lapis Penetrasi)	F	m		3	06001000
06001010	Jalan Buras (Laburan Aspal)	F	m		3	06001000
06002000	Penunjang Jalan				2	06000000
06002001	Gorong-Gorong	F	m		3	06002000
06002002	Tembok Penahan tanah / plesengan /talud	F	m		3	06002000
06002003	Bronjong	F	m		3	06002000
06002004	Drainase / Parit Tepi	F	m		3	06002000
06002005	Bahu Jalan / Median	F	m		3	06002000
06002006	Penerangan Jalan	F	unit		3	06002000
06003000	Jembatan				2	06000000

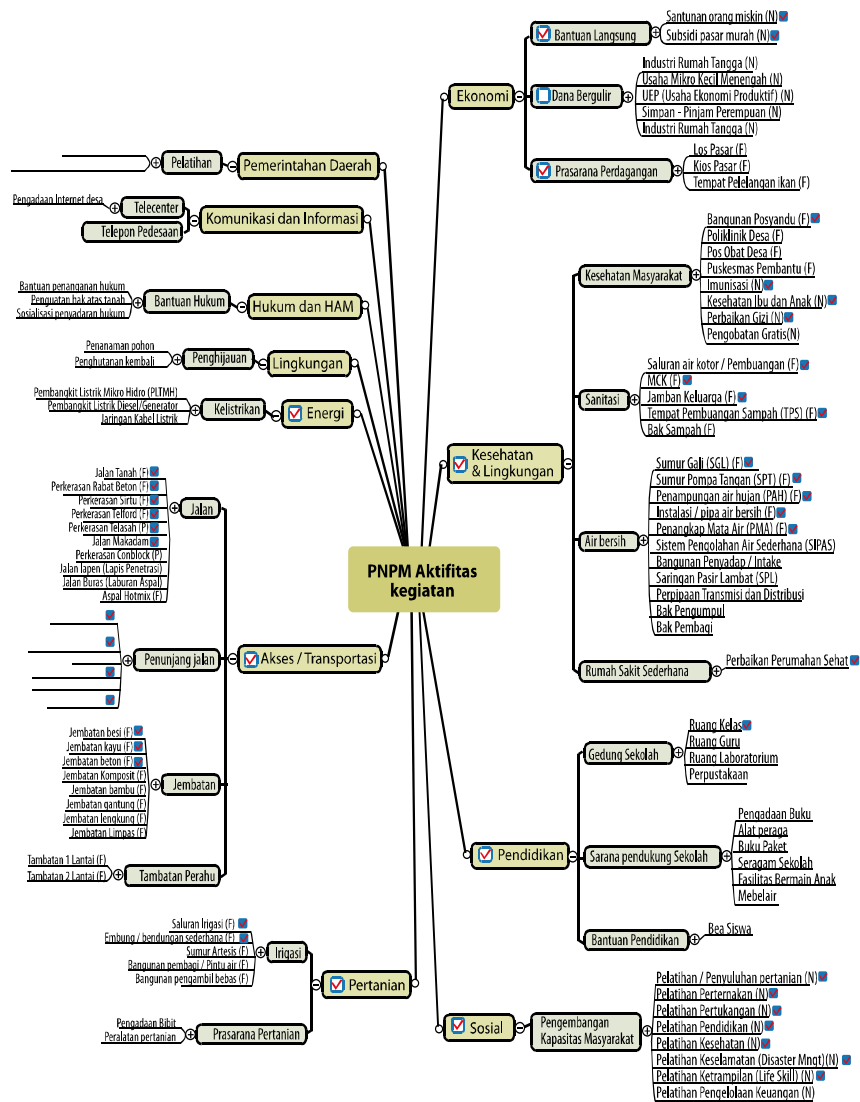


M_Kegiatan						
Kegiatan_ID	Deskripsi	Jenis	Satuan_kode	Detail	Level	ParentID
06003001	Gelagar Besi	F	unit		3	06003000
06003002	Gelagar Kayu	F	unit		3	06003000
06003003	Gelagar Beton / Batu	F	unit		3	06003000
06003004	Jembatan Bambu	F	unit		3	06003000
06003005	Jembatan Gantung	F	unit		3	06003000
06003006	Jembatan Pasangan batu / bata	F	unit		3	06003000
06003007	Gelagar Komposit	F	unit		3	06003000
06004000	Dermaga	F	unit		2	06000000
06004001	Tambatan 1 Lantai	F	unit		3	06004000
06004002	Tambatan 2 Lantai	F	unit		3	06004000
07000000	Lingkungan				1	
07001000	Penghijauan				2	07000000
07001001	Penanaman Pohon	F	unit		3	07001000
07002000	Pertamanan	F	unit		2	07000000
08000000	Komunikasi				1	
09000000	Hukum dan HAM				1	
10000000	Energi				1	

3. Diagram Kegiatan PNP 2008



LAMPIRAN





Prosedur Operasional Standar Mekanisme Verifikasi SPI/MIS

A. FLOW DATA & VERIFIKASI DATA

No	Aktivitas	Data	Form Pendukung	Pelaku	Penanggung jawab	Deadline
		Pendukung				
	A	B	C	D	E	F
1	Kegiatan di Lapangan	N/A	Form Daftar Hadir, Form Berita Acara, dll	Masyarakat	SF, Fasilitator Kecamatan	H
2	Input data ke Log book	C1	Form Isian SPI/MIS sesuai siklus	Fasilitator Kecamatan, SF	Fasilitator Kecamatan, SF	H + 3
3	Penyerahan Log book ke Koordinator Provinsi	C2 (ditandatangani Fasilitator Kelurahan/ Desa dan SF)	Form Berita Acara penyerahan oleh Fasilitator Kecamatan ke Koordinator Provinsi (ditandatangani oleh Koordinator Provinsi, disimpan oleh Fasilitator Kecamatan bersama C1)	Fasilitator Kecamatan, Koordinator Provinsi	Koordinator Provinsi	Bi-Weekly
4	Verifikasi Log Book oleh Koordinator Provinsi	C2, Spot check lapangan, data monev	Form Verifikasi (ditandatangani oleh Koordinator Provinsi)	Koordinator Provinsi	Koordinator Provinsi	F3 + 2
5	Input Data oleh Operator Komputer Koordinator Provinsi	C2, C4	Form Input (ditandatangani oleh Operator Komputer)	Operator Komputer	Operator Komputer	F4+2
6	Verifikasi oleh Operator Komputer Koordinator Provinsi	Data SPI/MIS Koordinator Provinsi	Form Verifikasi tk. Koordinator Provinsi (ditandatangani oleh Operator Komputer, Koordinator Provinsi)	Operator Komputer	Operator Komputer, Koordinator Provinsi	F5 + 1
7	Penyerahan Data SPI/MIS Koordinator Provinsi ke Koordinator Provinsi	B6, C6	Form verifikasi tk. Koordinator Provinsi (Dikembalikan oleh Koordinator Provinsi ke Koordinator Provinsi setelah F8)	Operator Komputer	Koordinator Provinsi	F6
8	Verifikasi oleh Operator Komputer Koordinator Provinsi	Data SPI/MIS Koordinator Provinsi	Form Verifikasi tk. Koordinator Provinsi (ditandatangani oleh Operator Komputer, Koordinator Provinsi)	Operator Komputer	Operator Komputer, Koordinator Provinsi	F7 + 1
9	Penyerahan Data SPI/MIS Koordinator Provinsi ke KMP	B8, C8	Form verifikasi tk. KMP (Dikembalikan oleh KMP ke Koordinator Provinsi setelah F10)	Operator Komputer	Koordinator Provinsi	F8

LAMPIRAN

No	Aktivitas	Data Pendukung	Form Pendukung	Pelaku	Penanggung jawab	Deadline
	A	B	C	D	E	F
10	Verifikasi oleh TA KMP	Data SPI/ MIS KMP	Form Verifikasi tk. KMP (ditanda-tangan oleh TA SPI/ MIS, KMP)	Operator Komputer	Operator Komputer, KMP	F9 + 2
11	Penyerahan Data SPI/MIS KMP ke PMT	B10, C10	Form verifikasi tk. PMT (Dikembalikan oleh PMT ke KMP setelah F12)	Operator Komputer	Koordinator Provinsi	F10
12	Verifikasi oleh Data Konsolidasi PMT	Data SPI/ MIS KMP	Form Verifikasi tk. PMT (ditandatangani oleh Data konsolidasi, TA SPI/MIS)	Data Konsolidasi	Data Konsolidasi, TA SPI/MIS KMP	F11 + 2
13	Upload SPI/MIS PMT ke Website	B12, C12		TA SPI/MIS KMP	TA SPI/MIS KMP	F12
14	Verifikasi Data SPI/ MIS Website oleh Operator Komputer Koordinator Provinsi, Operator Komputer Koordinator Provinsi, TA SPI/MIS KMP, Data Konsolidasi	Data SPI/ MIS Website (www.p2kp.org/arsipsim)	Form Verifikasi Website (Ditandatangani oleh masing-masing Operator Komputer, dikembalikan ke PMT)	Operator Komputer Koordinator Provinsi, Operator Komputer Koordinator Provinsi, TA SPI/ MIS KMP, Data Konsolidasi	TA SPI/MIS KMP	F13+2
15	Feed Back / Revisi data bila diperlukan	B14, C14	Berita Acara	Data Konsolidasi, TA SPI/MIS KMP	TA SPI/MIS KMP	F14 + 2
16	Verifikasi final Data Konsolidasi	B15	Form Verifikasi final	Data Konsolidasi, TA SPI/MIS KMP	TA SPI/MIS KMP	F15 + 1
17	Upload final Data	B15, C15	TA SPI/MIS KMP	TA SPI/MIS KMP	F12	F16



B. PROSEDUR VERIFIKASI

1. Cut off date SPI/MIS: Tanggal 15 dan akhir bulan setiap bulannya
2. Back up data SPI/MIS yang diserahkan ke level di atasnya
3. Verifikasi data internal:
 - Bandingkan dengan status sebelumnya
 - Perbandingan dilakukan dengan menggunakan Excel Sheet
 - Sheet #1 Status Bulan ini
 - Sheet #2 Status Bulan sebelumnya
 - Sheet #3 Hasi (Sheet #1 – Sheet #2)
 - Tujuan dari proses verifikasi:
 - Penurunan Data
 - Data Anomaly
 - Konsistensi data pencairan dengan pemanfaatan
 - Konsistensi data hasil fisik dengan rupiah pemanfaatan BLM
 - DII
 - Hasil verifikasi dibuatkan tabel per Kelurahan / Koordinator Provinsi / Koordinator Provinsi dengan hasil temuan dalam %
 - Hasil verifikasi dilampirkan sebagai data pendukung / rekomendasi data diterima. Data SPI/MIS diterima apabila hasil verifikasi = 0
4. Verifikasi data Website : sama dengan proses #3, dengan sumber data dari www.p2kp.org/arsipsim atau website kegiatan lainnya.
5. Apabila ditemukan inkonsistensi data setelah tampil di website, ada kesempatan untuk merevisi data website (ref. Tabel #15). Konsultan bersangkutan dikenakan sanksi ditahannya invoice



C. TANGGAL-TANGGAL PENTING

1. Cut off date: Setiap tanggal 15 atau akhir bulan setiap bulannya
2. Data tampil di website : setiap tanggal 10
3. Revisi apabila ada temuan : Setiap tanggal 15



LAMPIRAN 5 KERANGKA LOGIS PNPMD MANDIRI

No.	Tujuan Khusus	Keluaran	Indikator Keberhasilan
1.	Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yg rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.	Masyarakat luas terlibat di dalam setiap tahap pengelolaan pembangunan.	Rata-rata keterlibatan masyarakat di dalam pengelolaan PNPMD Mandiri: <ul style="list-style-type: none"> • penduduk dewasa miskin, rentan, dan komunitas adat/terpencil • perempuan
	Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap berbagai pelayanan dasar seperti: pendidikan, kesehatan, sanitasi dan air bersih, dan lain sebagainya.	<p>Meningkatnya pemanfaatan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sanitasi oleh keluarga miskin.</p> <p>Meningkatnya pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.</p> <p>Meningkatnya kualitas hidup keluarga miskin, terutama kesehatan ibu dan anak.</p>	<p>Kunjungan keluarga miskin ke fasilitas pelayanan kesehatan.</p> <p>Partisipasi siswa pendidikan dasar.</p> <p>Tingkat pemanfaatan infrastruktur dasar.</p> <p>Indikator Outcome</p> <p>Penurunan indikator-indikator kesehatan dan pendidikan pada 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kematian ibu melahirkan turun dari 307 (per 100.000 kelahiran hidup) pada 2002 menjadi 97 pada 2015. • Tingkat kematian bayi turun dari 34,7% (2004) menjadi 19% pada 2015. • Tingkat kurang berat badan/kurang gizi pada anak usia 5 tahun turun dari 27,5% (pada 2004) menjadi 17,8 pada 2015. • Hasil belajar meningkat seperti tercermin dalam nilai ujian akhir nasional. <p>Indikator kesehatan dan pendidikan meningkat paling tidak di 230 kecamatan, di 20 kabupaten:</p> <p>Kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cakupan imunisasi untuk bayi umur 12-23 bulan meningkat, dari 38% pada 2005 menjadi 48% pada 2009. • Kunjungan pra-melahirkan naik, dari 56% pada 2005 menjadi 66% pada 2009. • Melahirkan dibantu bidang terlatih naik, dari 40% pada 2005 menjadi 50% pada 2009. • Gizi: % anak kurang gizi menurut angka berat badan untuk bayi usia 0-11 bulan turun, dari 29% pada 2004 menjadi 19% pada 2009. • Vitamin A: % anak di bawah 5 tahun yang mendapat 2 kapsul Vit A selama 12 bulan terakhir naik, dari 62% pada 2004 menjadi 72% pada 2009. <p>Pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Murid SD terdaftar naik dari 96,5% pada 2005 menjadi 97% pada 2009. • Murid SMP terdaftar naik dari rata-rata 57% pada 2006 menjadi 72% pada 2009. • Hasil tes matematika dan bahasa Indonesia naik 5% poin dari data dasar survei.

LAMPIRAN

2009	2012	Sumber Data	Keterangan
40% 40%	60% 50%	SPI/MIS	<p>Pengelolaan PNPM Mandiri dimaksud adalah mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemantauan.</p> <p>Persentase keterlibatan diperhitungkan berdasarkan keterlibatan rata-rata kelompok sasaran di dalam setiap tahapan pengelolaan PNPM Mandiri.</p> <p>Kategori penduduk dewasa adalah penduduk dengan usia ≥ 18 tahun atau sudah kawin atau sering disebut penduduk yang telah memiliki hak pilih.</p>
#% #% #%	#% #% #%	SPI/MIS SPI/MIS Evaluasi SPI/MIS dan Evaluasi	<p>Perkembangan data didapat dari <i>baseline survey</i> dan lanjutannya.</p> <p>Indikator terkait sektor pendidikan dan kesehatan ini secara khusus didapat dari komponen PNPM Generasi.</p> <p>Indikator diperhitungkan berdasarkan lokasi-lokasi PNPM Generasi.</p> <p>Partisipasi siswa pendidikan dasar dihitung berdasarkan tingkat kehadiran siswa pendidikan dasar (kelas 1 s/d 9 sekolah dasar).</p> <p>Infrastruktur/prasarana dasar adalah air bersih, pembuangan air limbah dan persampahan, sanitasi lingkungan, jalan/jembatan, dlsb.</p> <p>Tingkat pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dasar salah satunya dinilai berdasarkan persentase kondisi layak dari prasarana dasar secara umum di desa/kelurahan wilayah sasaran program.</p>



No.	Tujuan Khusus	Keluaran	Indikator Keberhasilan
2.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel.	Terwujudnya lembaga-lembaga masyarakat yang memenuhi kriteria dan prasyarat: <ul style="list-style-type: none"> representatif (<i>dibentuk berdasar keswadayaan masyarakat</i>) dipercaya masyarakat dan mampu mendorong partisipasi masyarakat mampu mengelola kegiatan-kegiatan pembangunan. 	<ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya lembaga masyarakat Lembaga masyarakat telah representatif, aspiratif, dan akuntabel.
3.	Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin, melalui kebijakan, program, dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (<i>pro-poor</i>).	Tersedia anggaran pemerintah daerah sebagai dana pendamping dari dana PNPM Mandiri yang akan dikelola oleh masyarakat.	<p>Dana pendamping dari Kabupaten/Kota:</p> <ul style="list-style-type: none"> kapasitas fiskal rendah sebesar 20% kapasitas fiskal tinggi sebesar 50%
4.	Meningkatkan sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.	Adanya kontribusi lembaga non pemerintah dalam mendukung kegiatan PNPM Mandiri.	Desa/kelurahan PNPM Mandiri yang memperoleh dukungan/ bantuan dari lembaga-lembaga non pemerintah dan masyarakat.
5.	Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.	Adanya program-program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang digagas oleh pemerintah daerah dan kelompok peduli selain PNPM Mandiri.	<p>Adanya program-program pemberdayaan masyarakat dan atau penanggulangan kemiskinan dari gagasan daerah.</p> <p>Efektifitas program-program daerah dalam memberdayakan masyarakat dan atau menanggulangi kemiskinan.</p>

LAMPIRAN

2009	2012	Sumber Data	Keterangan
60%	100%	SPI/MIS	Persentase terbentuknya lembaga keswadayaan masyarakat dihitung berdasarkan jumlah desa/kelurahan yang menjadi sasaran program dan diprioritaskan kepada desa-desa tertinggal.
-	60%	Evaluasi	Keberadaan lembaga keswadayaan masyarakat (LKM) yang telah merepresentasikan masyarakat, mampu menggalang partisipasi masyarakat, mampu mengawal aspirasi masyarakat, dan pengelolaannya telah akuntabel akan diukur melalui kajian/studi evaluasi yang dikembangkan oleh program-program.
50%	80%	SPI/MIS	Dana pendamping daerah (kabupaten/kota) dapat lebih besar dari yang disyaratkan. Semakin besar dana pendamping, menunjukkan semakin besar pula <i>awareness</i> (kepedulian) pemerintah daerah dalam upaya memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.
15%	40%	Evaluasi	Persentase dapat diukur dengan membandingkan antara desa/kelurahan yang memperoleh dukungan lembaga-lembaga non pemerintah terhadap keseluruhan desa/kelurahan yang menjadi sasaran PNPM Mandiri. Dukungan lembaga-lembaga non pemerintah dapat berupa dana atau barang (<i>natura/inkind</i>). Penyerahan pengelolaan dana lembaga-lembaga non-pemerintah sebagian atau seluruhnya kepada masyarakat sesuai pola PNPM Mandiri dapat menjadi salah satu diantaranya. Salah satu potensi dukungan/bantuan dimaksud adalah CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>).
10%	30%	SPI/MIS	Persentase dihitung berdasarkan kabupaten/kota yang telah memiliki program-program pemberdayaan masyarakat dan atau penanggulangan kemiskinan terhadap seluruh kabupaten/kota sasaran PNPM Mandiri.
-	20%	Evaluasi	Efektifitas dinilai melalui pengukuran pengurangan penganggur dan peningkatan pendapatan penduduk miskin serta indikator sektoral lainnya yang dirumuskan oleh masing-masing program.



No.	Tujuan Khusus	Keluaran	Indikator Keberhasilan
6.	Meningkatkan modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.	Berkembangnya budaya gotong royong dan <i>volunterism</i> . Berkembangnya budaya masyarakat melalui PNPM Mandiri.	Adanya dukungan masyarakat terhadap kegiatan PNPM Mandiri secara sukarela. Adanya budaya-budaya lokal yang memperlancar pelaksanaan kegiatan-kegiatan PNPM Mandiri.
7.	Meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi, dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.	Kemudahan akses informasi PNPM Mandiri. Kemudahan akses komunikasi berbagai pertanyaan dan permasalahan PNPM Mandiri. Munculnya dan di dayagunakannya berbagai inovasi untuk pengembangan PNPM Mandiri.	Desa/kelurahan yang telah menggunakan media informasi (<i>brosur/papan informasi/media elektronik/media cetak</i>) tentang informasi PNPM Mandiri yang dapat diakses oleh masyarakat miskin. Tersedianya pusat/unit informasi di kecamatan yang dapat diakses oleh masyarakat miskin sebagai tempat bertanya, berkonsultasi, atau mengadakan program. Ada terobosan dalam mengefektifkan dan mengefisienkan pengelolaan program.

LAMPIRAN

2009	2012	Sumber Data	Keterangan
10%	40%	Evaluasi	Penilaian dilakukan terhadap kabupaten/kota yang telah mengembangkan budaya gotong royong, kerelawanan sosial, dan budaya lokal lainnya yang mendukung kegiatan PNPM Mandiri terhadap seluruh kabupaten/kota sasaran program.
40%	100%	SPI/MIS	Persentase desa/kelurahan yang telah menggunakan media informasi dalam mensosialisasikan PNPM Mandiri dihitung berdasarkan seluruh desa/kelurahan yang menjadi sasaran PNPM Mandiri
30%	75%	SPI/MI	Persentase kecamatan yang telah mengembangkan unit informasi diperhitungkan berdasarkan jumlah kecamatan yang menjadi sasaran PNPM Mandiri.
5%	30%	SEvaluasi	Persentase inovasi pengelolaan program dinilai berdasarkan jumlah kecamatan yang menjadi sasaran PNPM Mandiri.



1. Data Dasar

No	Indikator	Satuan	Tingkat	Metode	Periode	Catatan	Keterangan
1.1	Jumlah Penduduk (L/P) per desa/kelurahan	org	Kel	SPI/MIS	12 bulan		
1.2	Jumlah Kepala Keluarga (KK)/ Rumah Tangga (RT) per desa/kelurahan	RT	Kel	SPI/MIS	12 bulan		
1.3	Jumlah KK/RT miskin per desa/kelurahan	RT	Kel	SPI/MIS	12 bulan		
1.4	Jumlah Perempuan miskin Kepala Keluarga per desa/kelurahan	org	Kel	SPI/MIS	12 bulan		Perempuan miskin Kepala Keluarga adalah janda miskin dengan tanggungan (anak/keluarga) atau Perempuan yang memiliki tanggungan (orang tua).
1.5	Rata-rata pendapatan penduduk miskin dan kelompok sasaran lainnya	rb rp	Kel	SPI/MIS	12 bulan		Kelompok sasaran lainnya: Penganggur, Perempuan miskin Kepala Keluarga, Penduduk miskin Cacat (disabled).
1.6	Jumlah Pengangguran Terbuka (L/P) per desa/kelurahan	org	Kel	SPI/MIS	12 bulan		Penganggur Terbuka adalah penduduk yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali.
1.7	Jumlah Setengah Penganggur Terbuka (L/P) per desa/kelurahan	org	Kel	SPI/MIS	12 bulan		Setengah Penganggur adalah penduduk yang memiliki pekerjaan tidak tetap, seperti pekerja/buruh musiman.
1.8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (L/P) per desa/kelurahan	%	Kel	SPI/MIS	12 bulan	Kurang sesuai untuk glosary, sebaiknya cukup dihitung dari (jml penduduk - jml penganggur) / jml penganggur ?	Adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja dengan penganggur yang berada dalam satu wilayah.
1.9	Jumlah Pencari Kerja yang Dilatih BLK/LLK per desa/kelurahan	org	Kel	SPI/MIS	12 bulan		Adalah jumlah tenaga kerja terlatih yang belum bekerja.
1.10	Jumlah Penduduk miskin yang bekerja di Sektor Formal per desa/kelurahan	org	Kel	SPI/MIS	12 bulan		Sektor Formal sesuai kriteria BPS.



LAMPIRAN

No	Indikator	Satuan	Tingkat	Metode	Periode	Catatan	Keterangan
1.11	Jumlah Penduduk miskin yang bekerja di Sektor Informal per desa/kelurahan	org	Kel	SPI/MIS	12 bulan		Sektor Informal sesuai kriteria BPS.
1.12	Jumlah TKI yang dikirim ke luar negeri secara Legal per desa/kelurahan	org	Kel	SPI/MIS	12 bulan		Diperoleh dari data Kantor Imigrasi setempat
1.13	Jumlah TKI yang dikirim ke luar negeri per desa/kelurahan	org	Kel	SPI/MIS	12 bulan		Diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja setempat.
1.14	Jumlah anak yatim-piatu miskin per desa/kelurahan.	org	Kel	SPI/MIS	12 bulan		Adalah anak yang sudah tidak memiliki orang tua (bapak dan ibu).
1.15	Jumlah penduduk miskin yang cacat fisik (<i>disabled</i>) per desa/kelurahan.	org	Kel	SPI/MIS	12 bulan		Cacat fisik yang dimaksud adalah ketiadaan salah satu atau beberapa anggota fisik yang berpengaruh kepada aktifitas keseharian.
1.16	Jumlah anak miskin usia sekolah yang putus sekolah per desa/kelurahan.	org	Kel	SPI/MIS	12 bulan		Anak miskin dimaksud adalah anak dari keluarga miskin yang tidak mampu membiayai sekolah.
1.17	Jumlah KK miskin yang tidak punya akses pelayanan kesehatan per desa/kelurahan.	RT	Kel	SPI/MIS	12 bulan		Jumlah KK miskin yang tidak memiliki Askeskin atau tidak mampu menjangkau fasilitas kesehatan karena jarak fasilitas kesehatan atau alasan lainnya.
1.18	Jumlah Usaha Koperasi, Kecil, dan Mikro per desa/kelurahan	unit	Kel	SPI/MIS	12 bulan		Usaha yang dimaksud dalam ketiga kelompok adalah usaha masyarakat dengan modal kecil dengan skala produksi yang kecil/terbatas.
1.19	Nilai Aset Usaha Koperasi, Kecil, dan Mikro per desa/kelurahan	rb rp	Kel	SPI/MIS	12 bulan		
1.20	Jumlah Rumah Tangga yang dapat mengakses Air Bersih dan Aman per desa/kelurahan	RT	Kel	SPI/MIS	12 bulan		
1.21	Jumlah RT miskin yang dapat mengakses Air Bersih dan Aman per desa/kelurahan	RT	Kel	SPI/MIS	12 bulan		



No	Indikator	Satuan	Tingkat	Metode	Periode	Catatan	Keterangan
1.22	Jumlah RT miskin per desa/kelurahan yang dapat Mengakses Sarana Sanitasi Dasar yang Layak dan Aman	RT	Kel	SPI/MIS	12 bulan		Akses terhadap Sanitasi Dasar yang disediakan untuk publik/bersama (<i>contoh: pembuangan sampah umum, jamban/MCK</i>) atau sanitasi dasar yang dimiliki oleh masing-masing Rumah Tangga.
1.23	Jumlah desa/kelurahan yang dapat Mengakses Siaran Televisi dan distribusi Surat Kabar	kel / desa	Kel	SPI/MIS	12 bulan		
1.24	Jumlah KK miskin yang dapat Mengakses Siaran Televisi dan Surat Kabar.	RT	Kel	SPI/MIS	12 bulan		
1.25	Jumlah Media Informasi di desa/kelurahan	unit	Kel	SPI/MIS	12 bulan		Termasuk di dalamnya adalah media cetak dan elektronik dari yang modern hingga yang sangat tradisional (papan pengumuman, dll).
1.26	Jumlah Penyuluh Lapangan per desa/kelurahan	org	Kel	SPI/MIS	12 bulan		Penyuluh dalam hal ini adalah penyuluh penerangan (informasi).

2. Data Proses

No	Indikator	Satuan	Tingkat	Metode	Periode	Catatan	Keterangan
2.1	Kabupaten/kota telah mengalokasikan Dana Daerah untuk mendukung program bersama PNPM Mandiri	Ya/Tidak	Kab	SPI/MIS	12 bulan		Persentase dihitung dari jumlah daerah yang telah mengalokasikan dana APBD untuk PNPM dibandingkan dengan keseluruhan daerah penerima PNPM Mandiri.
2.2	Kabupaten/kota yang telah memenuhi syarat minimum alokasi Dana Daerah untuk mendukung program bersama PNPM Mandiri sesuai ketetapan (Kapasitas Fiskal Rendah ?20% atau Kapasitas Fiskal Tinggi?50%)	Ya/Tidak	Kab	SPI/MIS	12 bulan		Persentase dari jumlah daerah yang telah mengalokasikan dana APBD untuk PNPM sesuai prasyarat PNPM dibandingkan keseluruhan daerah yang menerima PNPM Mandiri.
2.3	Kabupaten/kota yang telah mencairkan Dana Daerah untuk mendukung program bersama PNPM Mandiri	Ya/Tidak	Kab	SPI/MIS	12 bulan		Jumlah kabupaten/kota yang belum mencairkan Dana Daerah untuk mendukung program bersama PNPM Mandiri dari sumber APBD dapat dihitung dengan menggunakan data ini.
2.4	Kabupaten/kota yang telah mencairkan dana BLM sumber APBN	Ya/Tidak	Kab	SPI/MIS	12 bulan		Jumlah kabupaten/kota yang belum mencairkan dana BLM sumber APBN dapat dihitung dengan menggunakan data ini.
2.5	Jumlah kebutuhan personel Konsultan Manajemen Pusat (KMP)	org	Nasional	SPI/MIS	12 bulan		Personil KMP yang dimaksudkan adalah untuk semua profesi/spesialis/keahlian.
2.6	Jumlah pemenuhan (sudah direkrut) kebutuhan personel KMP	org	Nasional	SPI/MIS	12 bulan		Kekurangan kebutuhan personel KMP dapat diperhitungkan dengan menggunakan data ini.
2.7	Jumlah personel KMP yang telah dilatih	org	Nasional	SPI/MIS	12 bulan		
2.8	Jumlah kebutuhan personel Konsultan Manajemen Provinsi (PMC)	org	Prov	SPI/MIS	12 bulan		Personil PMC yang dimaksudkan adalah untuk semua profesi/spesialis/keahlian.



No	Indikator	Satuan	Tingkat	Metode	Periode	Catatan	Keterangan
2.9	Jumlah pemenuhan (sudah direkrut) kebutuhan personil PMC	org	Prov	SPI/MIS	12 bulan		Kekurangan kebutuhan personil PMC dapat diperhitungkan dengan menggunakan data ini.
2.10	Jumlah personil PMC yang telah dilatih	org	Prov	SPI/MIS	12 bulan		
2.11	Jumlah personil PMC yang telah dimobilisasi (ditempatkan)	org	Prov	SPI/MIS	12 bulan		
2.12	Jumlah kebutuhan personil Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota (DMC)	org	Kab	SPI/MIS	12 bulan		Personil DMC yang dimaksudkan adalah untuk semua profesi/spesialis/keahlian.
2.13	Jumlah pemenuhan (sudah direkrut) kebutuhan personil DMC	org	Kab	SPI/MIS	12 bulan		Kekurangan kebutuhan personil DMC dapat diperhitungkan dengan menggunakan data ini.
2.14	Jumlah personil DMC yang telah dilatih	org	Kab	SPI/MIS	12 bulan		
2.15	Jumlah personil DMC yang telah dimobilisasi (ditempatkan)	org	Kab	SPI/MIS	12 bulan		
2.16	Jumlah kebutuhan personil fasilitator pemberdayaan-kecamatan (FK)	org	Kec	SPI/MIS	12 bulan		
2.17	Jumlah pemenuhan (sudah direkrut) kebutuhan personil fasilitator pemberdayaan-kecamatan (FK)	org	Kec	SPI/MIS	12 bulan		Kekurangan kebutuhan personil fasilitator pemberdayaan-kecamatan dapat diperhitungkan dengan menggunakan data ini.
2.18	Jumlah personil fasilitator pemberdayaan (FK) yang telah dilatih	org	Kec	SPI/MIS	12 bulan		
2.19	Jumlah personil fasilitator pemberdayaan (FK) yang telah dimobilisasi (ditempatkan)	org	Kec	SPI/MIS	12 bulan		
2.20	Jumlah kebutuhan personil fasilitator teknis-kecamatan	org	Kec	SPI/MIS	12 bulan		
2.21	Jumlah pemenuhan (sudah direkrut) kebutuhan personil fasilitator teknis-kecamatan	org	Kec	SPI/MIS	12 bulan		Kekurangan kebutuhan personil fasilitator teknis-kecamatan dapat diperhitungkan dengan menggunakan data ini.



LAMPIRAN

No	Indikator	Satuan	Tingkat	Metode	Periode	Catatan	Keterangan
2.22	Jumlah personil fasilitator teknis-kecamatan yang telah dilatih	org	Kec	SPI/MIS	12 bulan		
2.23	Jumlah personil fasilitator teknis-kecamatan yang telah dimobilisasi (ditempatkan)	org	Kec	SPI/MIS	12 bulan		
2.24	Jumlah kebutuhan personil fasilitator pemberdayaan-desa /kelurahan (Fasdes/Faskel)	org	Kel	SPI/MIS	12 bulan		
2.25	Jumlah pemenuhan (sudah direkrut) kebutuhan personil fasilitator pemberdayaan-desa /kelurahan (Fasdes/Faskel)	org	Kel	SPI/MIS	12 bulan		Kekurangan kebutuhan personil fasilitator pemberdayaan-desa/kelurahan dapat diperhitungkan dengan menggunakan data ini.
2.26	Jumlah personil fasilitator pemberdayaan-desa/kelurahan (Fasdes/Faskel) yang telah dilatih	org	Kel	SPI/MIS	12 bulan		
2.27	Jumlah personil fasilitator pemberdayaan desa/kelurahan (Fasdes/Faskel) yang telah dimobilisasi (ditempatkan)	org	Kel	SPI/MIS	12 bulan		
2.28	Jumlah kebutuhan personil fasilitator teknis-desa/kelurahan	org	Kel	SPI/MIS	12 bulan		
2.29	Jumlah pemenuhan (sudah direkrut) kebutuhan personil fasilitator teknis-desa/kelurahan	org	Kel	SPI/MIS	12 bulan		Kekurangan kebutuhan personil fasilitator teknis-desa/kelurahan dapat diperhitungkan dengan menggunakan data ini.
2.30	Jumlah personil fasilitator teknis-desa/kelurahan yang telah dilatih	org	Kel	SPI/MIS	12 bulan		
2.31	Jumlah personil fasilitator teknis-desa/kelurahan yang telah dimobilisasi (ditempatkan)	org	Kel	SPI/MIS	12 bulan		
2.32	Desa/kelurahan yang telah membentuk Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)	Ya/Tidak	Kel	SPI/MIS	12 bulan		
2.33	Desa/kelurahan yang telah memiliki LKM yang representatif, aspiratif, dan akuntabel	Ya/Tidak	Kel	SPI/MIS	12 bulan		



No	Indikator	Satuan	Tingkat	Metode	Periode	Catatan	Keterangan
2.34	Desa/kelurahan yang sedang dalam proses pembentukan LKM	Ya/Tidak	Kel	SPI/MIS	12 bulan		
2.35	Desa/kelurahan yang belum membentuk LKM	Ya/Tidak	Kel	SPI/MIS	12 bulan		
2.36	Kecamatan yang telah membentuk Unit Pelaksana Kegiatan (UPK)/Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	Ya/Tidak	Kec	SPI/MIS	12 bulan		
2.37	Kecamatan yang sedang dalam proses pembentukan Unit Pelaksana Kegiatan (UPK)/BKM	Ya/Tidak	Kec	SPI/MIS	12 bulan		
2.38	Kecamatan yang belum membentuk UPK/BKM	Ya/Tidak	Kec	SPI/MIS	12 bulan		
2.39	Desa/kelurahan yang telah menyusun Action Plan (Rencana Desa/Kelurahan)	Ya/Tidak	Kel	SPI/MIS	12 bulan		
2.40	Desa/kelurahan yang sedang dalam proses penyusunan Rencana Desa/Kelurahan	Ya/Tidak	Kel	SPI/MIS	12 bulan		
2.41	Desa/kelurahan kecamatan yang belum menyusun Rencana Desa/Kelurahan	Ya/Tidak	Kel	SPI/MIS	12 bulan		
2.42	Rencana Kecamatan (antar desa/kelurahan) yang sudah disusun	Ya/Tidak	Kec	SPI/MIS	12 bulan		Hasil Musyawarah Antar Desa/ Kelurahan dalam membahas kegiatan-kegiatan prioritas lintas desa/kelurahan tersusun dalam bentuk Rencana Kecamatan yang selanjutnya akan didanai PNPM Mandiri.
2.43	Rencana Kecamatan (antar desa/kelurahan) yang sedang dalam proses	Ya/Tidak	Kec	SPI/MIS	12 bulan		
2.44	Rencana Kecamatan (antar desa/kelurahan) yang belum disusun	Ya/Tidak	Kec	SPI/MIS	12 bulan		
2.45	LKM yang telah memiliki/ membuka rekening bank	Ya/Tidak	Kel	SPI/MIS	12 bulan		

3. Data Keluaran

No	Indikator	Satuan	Tingkat	Metode	Periode	Catatan	Keterangan
3.1	Keterlibatan masyarakat miskin dalam musyawarah perencanaan pembangunan		Kel			?	
3.2	Keterlibatan masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan rencana pembangunan		Kel			?	
3.3	Keterlibatan masyarakat miskin dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan		Kel			?	<p>Diukur melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase masyarakat miskin yang menerima upah dari keterlibatannya dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana fisik (padat karya) • Persentase masyarakat miskin yang menerima bantuan permodalan.
3.4	Keterlibatan perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan		Kel			?	
3.5	Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan rencana pembangunan		Kel			?	
3.6	Keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan		Kel			?	
3.7	Desa/kelurahan yang menerima bantuan/dukungan dari lembaga-lembaga non pemerintah	Ya/Tidak	Kab	SPI/MIS	12 bulan		Lembaga Non Pemerintah/NGO yang memberikan bantuan dimaksud adalah untuk tujuan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang sedang berjalan.



No	Indikator	Satuan	Tingkat	Metode	Periode	Catatan	Keterangan
3.8	Kabupaten/kota yang memiliki program-program penanggulangan kemiskinan dari sumber APBD diluar PNPM Mandiri	Ya/Tidak	Kab	SPI/MIS	12 bulan		Daerah dengan sumber APBD memungkinkan untuk mengembangkan program-program penanggulangan kemiskinan. Program-program yang dikoordinasi oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
							Kabupaten/kota yang diukur adalah kabupaten/kota yang menjadi penerima bantuan PNPM Mandiri.
3.9	Desa/kelurahan yang menerima bantuan program-program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat (non bantuan sosial) dari sumber APBD diluar PNPM Mandiri	Ya/Tidak	Kel	SPI/MIS	12 bulan		Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat merupakan kelompok program yang dikembangkan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Selain kelompok itu masih terdapat kelompok program-program bantuan sosial dan kelompok program-program kredit mikro.
4.10	Efektifitas program-program pemberdayaan masyarakat miskin yang digagas oleh daerah	Ya/Tidak	Kel	SPI/MIS	12 bulan		Efektifitas ditunjukkan dengan tercapainya sasaran program tersebut.
4.11	Desa/kelurahan PNPM Mandiri yang memperoleh dukungan masyarakat secara sukarela	Ya/Tidak	Kel	SPI/MIS	12 bulan		Ditunjukkan dengan adanya kegotongroyongan dan kerelawanan dari masyarakat.
4.12	Desa/kelurahan yang telah menggunakan media informasi untuk menyebarkan PNPM Mandiri yang dapat diakses oleh masyarakat miskin	Ya/Tidak	Kel	SPI/MIS	12 bulan		Berbagai jenis media dapat dijadikan parameter ketercapaian dari indikator ini. Indikator ini meliputi dua jenis penilaian: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah desa/kelurahan yang telah menggunakan media informasi untuk menyebarkan PNPM Mandiri; • Seberapa jauh media informasi PNPM tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat miskin (efektifitas).

LAMPIRAN

No	Indikator	Satuan	Tingkat	Metode	Periode	Catatan	Keterangan
4.13	Tersedianya pusat/unit informasi di kecamatan yang dapat diakses oleh masyarakat miskin sebagai tempat bertanya, berkonsultasi, atau mengadakan program	Ya/Tidak	Kec	SPI/MIS	12 bulan		Unit/pusat informasi ini minimal memiliki penanggung jawab (personil) yang sedia setiap saat untuk menerima warga yang bertanya/ berkonsultasi/ mengadakan kasus-kasus program.
4.14	Kabupaten/kota yang memiliki terobosan di dalam meng-efektifkan dan mengefisienkan pengelolaan program	Ya/Tidak	Kab	SPI/MIS	12 bulan		Terobosan dimaksud adalah berbagai inovasi yang dilakukan daerah terhadap implementasi PNPM Mandiri di wilayahnya untuk tujuan efisiensi dan efektifitas program. misalnya penetapan Perda/SK Kepala Daerah mengenai penanganan <i>complaint</i> masyarakat, pengintegrasian perencanaan daerah dengan perencanaan PNPM Mandiri, dll. Bentuk inovasi daerah ini termasuk yang menjadi lampiran laporan.
4.15	Persentase hasil kegiatan pembangunan prasarana/ fisik dengan kualitas baik					?	Kualitas prasarana fisik yang dibangun dari dana PNPM Mandiri akan dinilai oleh fasilitator teknik.



4. Data Hasil

No	Indikator	Satuan	Tingkat	Metode	Periode	Catatan	Keterangan
1	Penurunan Jumlah KK/Rumah Tangga miskin per desa/ kelurahan	RT					
2	Penurunan Jumlah Perempuan miskin Kepala Keluarga per desa/kelurahan	org					Indikator ini dibedakan dengan indikator KK miskin (No. 1) dikarenakan KK dalam pengertian jamak lebih diidentikkan dengan Laki-Laki sebagai kepala keluarga.
3	Peningkatan rata-rata pendapatan penduduk miskin dan kelompok sasaran lainnya	rb rp					Terhadap rata-rata pendapatan penduduk miskin dan kelompok sasaran sebelum intervensi program (<i>baseline</i>).
4	Penurunan Jumlah Pengangguran Terbuka (L/P) per desa/ kelurahan	org					
5	Penurunan Jumlah Setengah Penganggur (L/P) per desa/ kelurahan	org					
6	Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja (L/P) per desa/ kelurahan	%					
7	Peningkatan Jumlah Pencari Kerja yang terlatih di BLK/LLK per desa/kelurahan	org					
8	Peningkatan Jumlah Penduduk miskin yang bekerja di Sektor Formal per desa/kelurahan	org					
9	Peningkatan Jumlah Penduduk miskin yang bekerja di Sektor Informal per desa/kelurahan	org					
10	Peningkatan Jumlah TKI yang dikirim ke luar negeri secara Legal per desa/kelurahan	org					
11	Penurunan jumlah penduduk miskin yang cacat fisik (<i>disabled</i>) per desa/kelurahan.	org					Cacat fisik yang dimaksud adalah ketiadaan salah satu atau beberapa anggota fisik yang berpengaruh kepada aktifitas keseharian.

LAMPIRAN

No	Indikator	Satuan	Tingkat	Metode	Periode	Catatan	Keterangan
12	Penurunan jumlah KK miskin yang tidak punya akses pelayanan kesehatan per desa/ kelurahan	%					Jumlah KK miskin yang tidak memiliki Askeskin atau tidak mampu menjangkau fasilitas kesehatan karena jarak fasilitas kesehatan atau alasan lainnya.
13	Penurunan jumlah anak miskin usia sekolah yang putus sekolah per desa/kelurahan.	%					Anak miskin dimaksud adalah anak dari keluarga miskin yang tidak mampu membiayai sekolah.
14	Peningkatan jumlah RT miskin per desa/kelurahan yang dapat Mengakses Sarana Sanitasi Dasar yang Layak dan Aman	%					Akses terhadap Sanitasi Dasar yang disediakan untuk publik/ bersama (<i>contoh: pembuangan sampah umum, jamban/ MCK</i>) atau sanitasi dasar yang dimiliki oleh masing-masing Rumah Tangga.
15	Peningkatan Jumlah Usaha Koperasi, Kecil, dan Mikro per desa/kelurahan	unt					
16	Peningkatan Nilai Aset Usaha Koperasi, Kecil, dan Mikro per desa/kelurahan	rb rp					
17	Peningkatan Persentase RT per desa/kelurahan miskin terhadap Akses Air Bersih dan Aman	RT					
18	Peningkatan Persentase RT miskin per desa/kelurahan terhadap Akses Sarana Sanitasi Dasar yang Layak dan Aman	RT					
19	Peningkatan Jumlah desa/ kelurahan yang dapat Mengakses Siaran Televisi dan Distribusi Surat Kabar per desa/ kelurahan	kel/ ds					
20	Peningkatan jumlah KK miskin yang dapat Mengakses Siaran Televisi dan Surat Kabar.	RT					
21	Peningkatan Jumlah Media Informasi di desa/kelurahan	unt					
22	Peningkatan Jumlah Penyuluh Lapangan per desa/kelurahan	org					



No	Indikator	Satuan	Tingkat	Metode	Periode	Catatan	Keterangan
23	Tingkat Pengembalian Pinjaman/Permodalan	%					Detail: <ul style="list-style-type: none"> Jumlah dana yang beredar di masyarakat (permodalan)rb rp Jumlah dana yang dikembalikan saat pelaporanrb rp Jumlah tunggakan saat pelaporanrb rp
24	Persentase usaha masyarakat yang menerima bantuan permodalan yang mengalami peningkatan produktifitas	%					
25	Persentase usaha masyarakat yang menerima bantuan permodalan yang mengalami peningkatan kualitas produksi	%					
26	Persentase usaha masyarakat yang menerima bantuan permodalan yang mengalami peningkatan pasar	%					
27	Persentase rata-rata pengeluaran pendapatan masyarakat miskin untuk kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok lainnya	%					Persentase dihitung berdasarkan jumlah pengeluaran rata-rata warga miskin untuk kebutuhan pokok terhadap total pendapatan.
28	Persentase anggaran daerah yang <i>pro poor</i>	%					Persentase dihitung berdasarkan kabupaten/kota yang telah menganggarkan dana APBD untuk program/kegiatan <i>pro poor</i> dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota yang menerima PNPM Mandiri.
29	Persentase kabupaten/kota yang telah menerbitkan kebijakan (Perda, SK Bupati/Walikota, dll) yang <i>pro poor</i>	%					Persentase dihitung berdasarkan kabupaten/kota yang telah menerbitkan perundangan <i>pro poor</i> dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota yang menerima PNPM Mandiri.

LAMPIRAN

No	Indikator	Satuan	Tingkat	Metode	Periode	Catatan	Keterangan
30	Persentase kabupaten/kota yang telah memiliki peraturan keuangan mikro yang <i>pro poor</i>	%					Persentase dihitung berdasarkan kabupaten/kota yang telah memiliki peraturan/perundangan daerah dalam hal mendukung keuangan mikro/ <i>pro poor</i> dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota yang menerima PNPM Mandiri.
31	Persentase kabupaten/kota yang telah memiliki lembaga kredit yang <i>pro poor</i>	%					Persentase dihitung berdasarkan kabupaten/kota yang telah memiliki lembaga keuangan mikro/ <i>pro poor</i> dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota yang menerima PNPM Mandiri.



5. Data Kemandirian

No	Indikator	Satuan	Tingkat	Metode	Periode	Catatan	Keterangan
1	Meningkatnya kerelawanan sosial paska program	Ya/Tidak	Kel	Monev	12 bulan		Munculnya relawan-relawan diantara masyarakat sendiri untuk secara sukarela membantu diantara mereka. Bantuan yang tidak lagi dikomersialisasikan atau dinominalkan.
2	Berkembangnya budaya dan nilai-nilai masyarakat yang mendukung pembangunan secara swadaya	Ya/Tidak	Kel	Monev	12 bulan		Saling dukung dalam pembangunan lingkungan seperti: gotong royong, rereongan, dan budaya lokal lainnya yang prinsipnya saling bahu membahu dalam pembangunan lingkungannya berdasar kemampuan dan sumber daya yang dimiliki masing-masing warga.
3	Meningkatnya kemauan dan kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana publik yang ada di lingkungannya	Ya/Tidak	Kel	Monev	12 bulan		Ditunjukkan dengan terawatnya aset-aset pembangunan yang ada.
4	Meningkatnya transparansi dan komunikasi pengelolaan program-program pembangunan di tingkat lokal	Ya/Tidak	Kel	Monev	12 bulan		Ditunjukkan dengan adanya informasi pembangunan oleh pemerintah dan pihak-pihak pengembang lainnya secara terbuka hingga kepada masyarakat miskin dan marjinal.
5	Meningkatnya kepercayaan diri masyarakat untuk mampu mengatasi permasalahan dan kebutuhannya sendiri	Ya/Tidak	Kel	Monev	12 bulan		Kepercayaan diri ini ditunjukkan dengan banyaknya masalah-masalah lingkungan yang dapat diatasi oleh warga sendiri.
6	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal	Ya/Tidak	Kel	Monev	12 bulan		Proses penetapan kegiatan dan rencana pembangunan melalui konsultasi dengan masyarakat di lingkungan secara terbuka.
7	Menurunkan kebergantungan lingkungan terhadap bantuan dari luar lingkungannya	Ya/Tidak	Kel	Monev	12 bulan		Ditunjukkan dengan perubahan dari pecarian sumbangan pembangunan menjadi ajakan kerja sama yang saling menguntungkan.

LAMPIRAN

No	Indikator	Satuan	Tingkat	Metode	Periode	Catatan	Keterangan
8	Meningkatnya jumlah dan kualitas pemimpin lokal yang mampu memberdayakan lingkungannya dan memotori pembangunan lingkungannya	Ya/Tidak	Kel	Monev	12 bulan		Diindikasikan dengan semakin banyaknya tokoh masyarakat yang dapat mengusung aspirasi kelompok masyarakat kecil dan termarginal.
9	Meningkatnya kemampuan lingkungan untuk menjalin kerjasama (<i>networking</i>) dengan berbagai pihak dengan saling menguntungkan	Ya/Tidak	Kel	Monev	12 bulan		Dependensi masyarakat dan lingkungan berganti dengan pengembangan jaringan dan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan (<i>terkait dengan No 7</i>).
10	Menguatnya lembaga masyarakat yang representatif dan akuntabel	Ya/Tidak	Kel	Monev	12 bulan		Lembaga-lembaga penguatan masyarakat hasil inisiasi masyarakat sendiri semakin berkembang dan memperoleh kepercayaan masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta.
11	Meningkatnya hak politik warga yang ditunjukkan dengan tingginya posisi tawar warga terhadap pembangunan lingkungannya	Ya/Tidak	Kel	Monev	12 bulan		Dalam konsultasi pembangunan, masyarakat memiliki hak suara dalam menentukan kebijakan pembangunan lingkungannya.
12	Meningkatnya kemampuan individual dari setiap warga untuk produktif	Ya/Tidak	Kel	Monev	12 bulan		Semakin rendahnya warga yang <i>unskill</i> (tidak memiliki ketrampilan/keahlian) dan rendahnya pengangguran.
13	Meningkatnya kepercayaan antar warga yang mendorong rasa aman dan tentram di lingkungannya	Ya/Tidak	Kel	Monev	12 bulan		Keamanan lingkungan yang semakin terjaga dengan minimnya konflik-konflik sosial.
14	Adanya kesamaan visi dan misi warga untuk pembangunan lingkungannya	Ya/Tidak	Kel	Monev	12 bulan		Adanya dokumen visioning pembangunan lingkungan sebagai hasil kesepakatan bersama dan didorong oleh warga untuk direalisasikan melalui berbagai sumber daya.
15	Adanya pemerataan kesejahteraan di lingkungan sehingga <i>gap</i> sosial dapat diminimalisir	Ya/Tidak	Kel	Monev	12 bulan		Gap/kesenjangan/perbedaan status ekonomi-sosial semakin kecil, yang ditunjukkan dengan standar ekonomi masyarakat yang semakin baik dan rendahnya angka kemiskinan di lingkungan.



PEDOMAN PELAKSANAAN
SISTEM PENGELOLAAN INFORMASI
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI

No	Indikator	Satuan	Tingkat	Metode	Periode	Catatan	Keterangan
16	Adanya perubahan paradigma pembangunan dari setiap pihak dari <i>topdown</i> menjadi <i>bottom up</i> sebenar-benarnya.	Ya/Tidak	Kel	Monev	12 bulan		Pola <i>bottom up</i> dengan selalu menggali aspirasi masyarakat (partisipasi) untuk pengelolaan pembangunan sudah menjadi model umum dalam semua sektor pembangunan.